



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) Tahun 2025 yang menguraikan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (DJPPPI) Tahun 2025–2029, Rencana Kerja DPAKOI Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja DPAKOI Tahun 2025.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Besar harapan kami, Lapkin DPAKOI Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja kami di lingkungan DJPPPI, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna peningkatan kinerja DPAKOI di masa mendatang.

Jakarta, 13 Maret 2026
Direktur Perundingan Antar Kawasan
dan Organisasi Internasional,



Natan Kambuno

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) merupakan unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di bawah Kementerian Perdagangan RI. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional memiliki peran signifikan dalam upaya peningkatan akses pasar barang di forum Organisasi Internasional. Diplomasi perdagangan tersebut dilakukan dengan tujuan agar kinerja perdagangan berdampak dan bermanfaat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Ditjen PPI dalam Perjanjian Kinerja (Lampiran 1) telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni (i) Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional; dan (ii) Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia, dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Secara umum, capaian sasaran program DPAKOI, Ditjen PPI sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja DPAKOI Tahun 2025 disusun untuk melaporkan hasil pemantauan kinerja secara periodik, sehingga tercapai keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian target dengan Rencana Strategis yang berlaku dan Rencana Kerja DPAKOI Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN) 2025. Pada Tahun Anggaran 2025, DPAKOI memperjanjikan dua sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja DPAKOI Tahun 2025

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional					
	1	Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	Kegiatan	6	6	100
2.	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia					
	2	Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	91.3	114.1

3.	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional					
	3	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	Persen	85	86.7	102
Rata-rata Capaian Tahun 2025						105.4

Sumber: DPAKOI (2026)

Secara umum, tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Tahun 2025 telah mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tiga indikator kinerja yang telah ditetapkan memiliki capaian 105,4 persen.

Penjelasan detail mengenai realisasi anggaran dan realisasi kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi internasional dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Terdapat dua sasaran kegiatan (Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional dan Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia) sebagai indikator pencapaian tujuan DPAKOI. Dari dua sasaran tersebut terdapat tiga indikator kinerja kegiatan.

Tabel 2. Realisasi Capaian Anggaran DPAKOI Tahun 2025

Tahun Pagu Anggaran (sebelum pagu revisi)	Pagu Anggaran Setelah Pemotongan	Realisasi Anggaran	Realisasi
Rp 4.671.397.000	Rp 1.993.193.000	Rp 1.992.911.965	99,99%

Sumber: DPAKOI (2026)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	2
TUJUAN	3
STRUKTUR ORGANISASI	4
PERAN STRATEGIS ORGANISASI	5
ISU STRATEGIS DI FORUM APEC	8
ISU STRATEGIS DI FORUM G20	10
ISU STRATEGIS DI FORUM PBB/UNCTAD	12
ISU STRATEGIS DI FORUM KOMODITAS INTERNASIONAL	15
ISU STRATEGIS DI FORUM OKI/D8	17
ISU STRATEGIS DI FORUM OECD	18
ISU STRATEGIS DI FORUM CPTPP	19
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	20
AKUNTABILITAS KINERJA	20
RENCANA STRATEGIS	21
PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA	23
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
SASARAN PROGRAM 1 - Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	25
KEGIATAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL	28
Kerja Sama di Forum APEC	28
Kerja Sama OECD dan Forum Kerja Sama Ekonomi Lainnya	39
Kerja Sama Organisasi Komoditas Kelapa, Lada dan Sawit	45
Kerja Sama Organisasi Komoditas Karet, Kopi dan Komoditas Lainnya	
Kerja Sama G20, BRICS, WEF dan G7	49
Kerja Sama di Forum D8, OKI, dan IORA	52
Kerja Sama Organisasi PBB (UNCTAD, UNESCAP) dan Organisasi Internasional Lainnya	59
Kerja Sama Organisasi CPTPP	63
Sasaran Program 2 - Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	67
Rekapitulasi Hasil Perundingan Posisi Indonesia pada APEC 2025	68
Rekapitulasi Hasil Perundingan Posisi Indonesia pada G20	70

Afrika Selatan 2025	
Sasaran Program 3 - Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional	78
Focus Group Discussion (FGD) G20	
KINERJA ANGGARAN	81
BAB IV	83
PENUTUP	83
KESIMPULAN	83
REKOMENDASI	84
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen DPAKOI Tahun 2025	iv
Tabel 2. Realisasi Capaian Anggaran DPAKOI Tahun 2025	v
Tabel 3. Jumlah dan Kualifikasi SDM DPAKOI Tahun 2025	4
Tabel 4. Indikator dan Target Kerja 2020-2024 atas Renstra DJPPI	21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja DPAKOI Tahun 2025	22
Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi DPAKOI Tahun 2025	24
Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	26
Tabel 8. Rincian Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	27
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	69
Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3	78
Tabel 11. Realisasi Kinerja Anggaran DPAKOI 2025	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi DPAKOI Tahun 2025	5
Gambar 2. Pertemuan Mendag RI dengan Dirjen WTO pada APEC MRT 2025	27
Gambar 3. Partisipasi Delegasi RI pada APEC CTI 3 Meeting	28
Gambar 4. Mendag RI dan Dirjen PPI pada APEC Ministerial Meeting (AMM) 2025	30
Gambar 5. Pertemuan <i>OECD Working Party of The Trade Committee dan Trade Committee</i>	32
Gambar 6. Pertemuan TWG Meeting ICC di Jakarta	34
Gambar 7. Sesi Tahunan ke-61/Pertemuan Tingkat Menteri ICC di Bangkok, Thailand	35
Gambar 8. Pertemuan ke-14 Komite Research & Development (R&D) IPC di Kandy, Sri Lanka	36
Gambar 9. Pertemuan ke-11 Komite Pemasaran IPC di Belitung, Indonesia	37
Gambar 10. Pertemuan ke-11 Komite Mutu IPC di Kuching, Malaysia	38
Gambar 11. Direktur PAKOI pada Pertemuan Eksekutif Heads of Delegations (HoD) ke-53 di Kochi, India	38
Gambar 12. Foto bersama <i>Chairman</i> ITRC, CEO IRCo, dan para HoD dari Thailand, Indonesia, dan Malaysia	41
Gambar 13. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional sebagai <i>Chairman</i> pada Pertemuan ITRC ke-40 di Yogyakarta, Indonesia	42
Gambar 14. Direktur PAKOI sebagai HoD dan Sesditjen PPI sebagai Alternate HoD bersama Delegasi RI pada Pertemuan ITRC ke-40	42
Gambar 15. Para Delegasi ANRPC pada Rangkaian Pertemuan ANRPC Tahun 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia	45
Gambar 16. Suasana Rangkaian Pertemuan ANRPC Tahun 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia	46
Gambar 17. Direktur PAKOI mewakili Dirjen PPI pada Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-139 (virtual)	48
Gambar 18. Dirjen PPI memimpin Delegasi RI pada Pertemuan G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) Afrika Selatan 2025	49

Gambar 19. Mendag RI didampingi Dirjen PPI pada G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) Afrika Selatan 2025	50
Gambar 20. Dirjen PPI mewakili Mendag RI pada 15th BRICS Trade Ministers Meeting (TMM) Brasil 2025	52
Gambar 21. Dirjen PPI sebagai narasumber dalam Global Commodities Forum UNCTAD16	59
Gambar 22. Mendag RI didampingi Dirjen PPI pada pertemuan bilateral di sela APEC MRT 2025	64
Gambar 23. Wamendag menghadiri CPTPP–ASEAN Trade and Investment Dialogue yang digelar secara virtual di Kantor Kementerian Perdagangan	65
Gambar 24. Wamendag menghadiri CPTPP–ASEAN Trade and Investment Dialogue (virtual) di Kantor Kementerian Perdagangan	65
Gambar 25. Jaring Masukan <i>Outcome</i> G20 TIWG Tahun 2025 dan Proyeksi Agenda G20 TIWG Tahun 2026, Bandung, 22 Desember 2025	81

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen utama dari prinsip *Good Governance* yang menjadi persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) Tahun 2025 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan DPAKOI kepada para pemangku kepentingan. Sumber daya tersebut meliputi anggaran keuangan, waktu, serta sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPAKOI yang harus dipertanggungjawabkan kepada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada kementerian. Penyusunan laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian/lembaga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai landasan dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Perdagangan telah menetapkan pedoman penyusunan dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan, yang saat ini sedang dalam proses penyesuaian. Keputusan tersebut mengamanatkan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat DPAKOI Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis serta perjanjian kinerja tahunan.

TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Kementerian dalam satu tahun anggaran. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis DPAKOI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.

Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan perundingan-perundingan perdagangan di berbagai forum internasional, telah menyampaikan dokumen pelaporan secara berkala (triwulan) kepada Menteri Perdagangan. Selanjutnya, pada Triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen PPI Tahun Anggaran 2025.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Direktorat Perundingan Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 164, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional;
3. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Forum APEC
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Organisasi Komoditas Kelapa, Lada dan Sawit
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Organisasi Komoditas Karet, Kopi dan Komoditas Lainnya
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Forum G20
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi OKI dan D8
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Forum OECD
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Forum PBB
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Forum CPTPP

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional sebanyak 45 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari :

i. Direktur	:	1	orang
ii. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	1	orang
iii. Negosiator Ahli Madya	:	9	orang
iv. Negosiator Ahli Muda	:	8	orang
v. Negosiator Ahli Pertama	:	13	orang
vi. Analis Perdagangan Ahli Muda	:	1	orang
vii. Analis Perdagangan Ahli Pertama	:	3	orang
viii. Perencanaan Ahli Pertama	:	1	orang
ix. Penelaah Teknis Kebijakan	:	2	orang
x. Pengolah Data dan Informasi	:	1	orang
xi. Penata Layanan Operasional	:	3	orang
xii. Pengadministrasi Perkantoran	:	2	orang

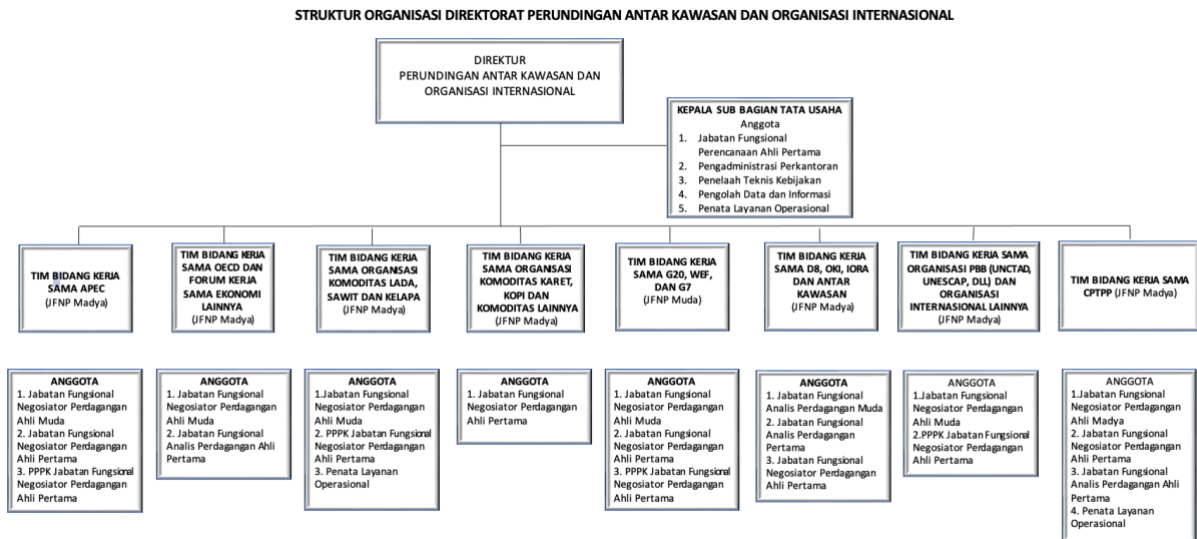
Jumlah : **45 orang**

Tabel. 3 Jumlah dan Kualifikasi SDM

No.	Pendidikan	Jumlah PNS & CPNS			Jumlah
		Go. II	Go. III	Go. IV	
1	SLTA	2	-	-	2
2	D3	1	-	-	1
3	S1	-	21	-	21
4	S2	-	11	10	21
5	S3	-	-	-	-
Jumlah		3	32	10	45

Sumber: DPAKOI (2026)

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL, DITJEN PPI



Sumber: DPAKOI (2026)

PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran Strategis Kerja Sama di Forum APEC

APEC memiliki peran strategis dalam memperkuat diplomasi perdagangan Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan perlambatan kemajuan perundingan multilateral, termasuk di WTO. Sebagai forum regional yang bersifat non-binding, APEC menyediakan ruang bagi Indonesia untuk mendorong isu-isu strategis seperti reformasi WTO, ekonomi digital, ekonomi hijau, fasilitasi perdagangan, dan penguatan rantai pasok global. Meski tidak mengikat secara legal, komitmen di APEC memiliki kekuatan politis yang kuat dan mampu membentuk norma serta arah kebijakan kawasan Asia Pasifik.

APEC juga berfungsi sebagai inkubator ide khususnya menuju integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik, termasuk melalui pembahasan *Free Trade Area of the Asia-Pacific* (FTAAP). Partisipasi aktif Indonesia di APEC memperkuat kesiapan nasional dalam menghadapi agenda integrasi kawasan sekaligus memperluas akses pasar dan peluang investasi.

Indonesia berpartisipasi aktif di beberapa tingkatan pertemuan APEC, mulai dari kelompok kerja teknis yaitu Market Access Group (MAG), level Komite yaitu pada Committee on Trade and Investment (CTI), hingga pertemuan tingkat Menteri, Minister Responsible for Trade (MRT) dan APEC Ministerial Meeting (AMM). Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) berperan sebagai instansi penjuror nasional di dan MAG dan CTI serta mengoordinasikan sub-fora terkait akses pasar, perdagangan jasa, investasi, standar, kepabeanan, mobilitas pelaku usaha, kekayaan intelektual, dan ekonomi digital.

Indonesia berkomitmen aktif dalam diplomasi ekonomi di APEC melalui dukungan dan kontribusi pada berbagai inisiatif yang memberikan manfaat bagi perdagangan, investasi, dan perekonomian nasional, termasuk peningkatan akses pasar produk unggulan dan pembukaan peluang investasi. Indonesia juga mengusulkan inisiatif kerja sama ekonomi dan teknik di bidang akses pasar dan fasilitasi perdagangan yang berhasil memperoleh pendanaan APEC guna memperkuat kapasitas domestik dan kawasan.

Sepanjang 2025, Indonesia memperoleh pendanaan APEC sebesar USD 1.651.525 untuk 13 proyek pengembangan kapasitas. DPAKOI mengimplementasikan dua proyek utama, yaitu (i) "APEC Workshop on Best Practices on Trade Facilitation for MSMEs, including Women-Owned SMEs: Shaping Better Opportunities for Regional and Global Value Chains"; dan (ii) "APEC Workshop Towards Digital Trade Ecosystem in the Asia-Pacific Region". Inisiatif ini memperkuat kapasitas domestik, mendukung UMKM, serta mendorong transformasi digital perdagangan kawasan.

Peran Strategis Kerja Sama OECD dan Forum Kerja Sama Ekonomi Lainnya

Salah satu inisiatif strategis yang menjadi fokus dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui proses akses keanggotaan ke Organisation for Economic Co-operation and Development/Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Bergabungnya Indonesia dalam OECD menjadi salah satu upaya dalam mendorong transformasi domestik dan institusi nasional dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

OECD merupakan organisasi kerja sama internasional yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara berpendapatan tinggi. Didirikan pada tahun 1961, OECD saat ini beranggotakan 38 negara dan lima mitra utama (Indonesia, Afrika Selatan, Brazil, India, dan Tiongkok). Berdasarkan data Trade Map 2023 (diolah DPAKOl), OECD dan mitra utamanya menguasai pangsa perdagangan sebesar 76,21% atau lebih dari 3/4 perdagangan dunia. Manfaat strategis yang diharapkan dari keanggotaan Indonesia di OECD antara lain: 1) Reformasi kebijakan yang sesuai standar OECD; 2) Potensi peningkatan PDB sebesar 0,94%; 3) Proyeksi kenaikan FDI sebesar USD 87,7 miliar (2028); dan 4) Proyeksi peningkatan ekspor ke negara OECD (khususnya *textile wearing apparel* dan produk kayu).

Untuk bergabung dengan OECD, negara kandidat harus memenuhi berbagai kriteria yang terdapat dalam *Framework for the Consideration of Prospective Members*. Proses akses mencakup 3 (tiga) tahap utama: pra-aksesi, akses, dan pasca-aksesi, yang memerlukan penyesuaian kebijakan domestik terhadap standar dan instrumen OECD, baik yang bersifat mengikat (*legally binding*) maupun tidak mengikat (*non-legally binding*).

Indonesia telah menjalin kemitraan dengan OECD sejak tahun 2007 dengan menjadi salah satu mitra utama yang ditindaklanjuti dengan kerja sama Joint Work Programme (JWP). Pada tanggal 13 Juli 2023, Indonesia menyetujui akses penuh ke OECD, yang diikuti dengan pertemuan Presiden RI dan Sekjen OECD pada Agustus 2023. Pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD tanggal 2-3 Mei 2024, Menko Perekonomian secara resmi menerima *OECD Accession Roadmap for Indonesia*. Pemerintah Indonesia menargetkan akses penuh ke OECD selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, atau pada tahun 2027. Untuk mendukung proses ini, Presiden RI telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 17 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD, yang diikuti dengan Keputusan Menko Perekonomian No. 232/2024 yang mengatur tugas penanggung jawab bidang dan sekretariat Tim Nasional OECD.

Dalam proses akses OECD, keterlibatan Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dengan Menteri Perdagangan sebagai Penanggung Jawab pada 4 (empat) Komite Bidang OECD, yaitu:

- 1) *Trade Committee and the Working Party on Export Credits (Trade Committee)*;
- 2) *Competition Committee*;
- 3) *Committee on Consumer Policy*; dan
- 4) *Investment Committee and the Working Party on Responsible Business Conduct (Investment Committee)*

Dari keempat komite tersebut, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional merupakan koordinator bidang Trade Committee/Komite Bidang Perdagangan dengan 3 (tiga) *responsible committee*/cakupan kerja, yang meliputi:

- 1) *Trade Committee*;
- 2) *Working Party on Export Credits and Credit Guarantees*; dan
- 3) *Committee on SMEs and Entrepreneurship*

Dalam peran ini, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional bertanggung jawab untuk mengoordinasi penyelesaian dokumen yang berisi hasil identifikasi penyesuaian regulasi nasional dengan instrumen-instrumen OECD pada komite-komite dimaksud. Berdasarkan *Accession Roadmap*, terdapat beberapa prinsip utama yang dinilai pada *technical accession review* Trade Committee and Working Party on Export Credits, yaitu:

- 1) Komitmen Indonesia terhadap transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan kebijakan perdagangan;
- 2) Komitmen Indonesia terhadap keterbukaan akses pasar produk pertanian dan non-pertanian serta jasa;
- 3) Komitmen terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual;
- 4) Komitmen terhadap standar OECD terkait kredit ekspor; dan
- 5) Komitmen Indonesia terhadap reformasi WTO.

Pada tahun 2025, Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, telah melakukan penilaian mandiri identifikasi keselarasan peraturan/kebijakan/praktik Indonesia dengan OECD dan penyelesaian dokumen Initial Memorandum (IM), pada instrumen terkait Komite Bidang Perdagangan. Pada 2025, Ditjen PPI selaku Koordinator Bidang Perdagangan telah menyelesaikan seluruh tahapan pra-reviu dokumen Initial Memorandum (IM) pada Komite Bidang Perdagangan. Tahapan tersebut meliputi penerimaan hasil pra-reviu dari Sekretariat OECD pada Januari 2025 atas penyusunan IM yang telah diselesaikan pada Desember 2024, serta penyampaian tanggapan Indonesia sebagai penyempurnaan atas 12 dokumen IM Komite Bidang Perdagangan melalui Kemenko Perekonomian selaku Sekretariat Tim Nasional pada Maret 2025. Selanjutnya, penyelesaian tahapan pra-reviu ini ditandai

dengan penyerahan dokumen IM kepada OECD oleh Menko Bidang Perekonomian pada Pertemuan Dewan Menteri OECD tanggal 3-4 Juni 2025 di Paris, Prancis.

Pasca penyerahan IM, Indonesia memasuki tahapan Reviu Teknis yang dimulai dengan tahapan information gathering, yakni penerimaan Kuesioner Market Openness Review (MOR) dan Kuesioner Kredit Ekspor dari Sekretariat OECD. Menindaklanjuti hal tersebut, sepanjang November–Desember 2025 dilakukan tahap awal pengisian kuesioner melalui serangkaian rapat teknis K/L, pertemuan bilateral dengan Sekretariat OECD dan tenaga ahli, serta on-site workshop Indonesia-OECD yang dihadiri K/L anggota Komite Bidang Perdagangan dengan mengundang perwakilan Sekretariat OECD. Tahapan Reviu Teknis selanjutnya dilakukan dengan penyelesaian kedua kuesioner tersebut dan kegiatan fact-finding mission OECD ke Indonesia pada 2026.

Peran strategis Kerja Sama di Forum Organisasi Komoditi Internasional

Keberhasilan Indonesia untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor komoditas utama perkebunan seperti sawit, karet, kopi, kelapa, dan lada, bergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia saat ini, kemantapan sistem perdagangan internasional, dan kemampuan ekonomi nasional dalam beradaptasi terhadap perkembangan perekonomian internasional. Di sisi lain, tantangan dalam peningkatan ekspor komoditas Indonesia adalah masih rendahnya posisi tawar negara produsen, menjaga stabilitas harga komoditas internasional di level yang menguntungkan bagi petani dan berbagai hambatan dan diskriminasi perdagangan oleh negara konsumen termasuk penerapan sertifikasi dan standar *sustainability* komoditas.

Untuk mendukung peningkatan akses pasar dan melindungi komoditas ekspor, Indonesia tergabung dalam organisasi komoditas internasional sebagai salah satu strategi kebijakan perdagangan. Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PPI merupakan *focal point* atau instansi penjurur pada perundingan isu perdagangan di Forum Organisasi Komoditas, yaitu: International Tripartite Rubber Council (ITRC), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), International Coffee Organization (ICO), International Coconut Community (ICC), dan International Pepper Community (IPC). Melalui keanggotaan dan partisipasi aktif pada OI Komoditas, Indonesia memperjuangkan isu-isu yang menjadi kepentingan nasional, antara lain: penguatan posisi tawar antar negara produsen; menjaga stabilitas harga di tingkat yang remunerative bagi petani; mengatasi hambatan dan diskriminasi perdagangan termasuk mendorong penyusunan standar *sustainability* sesuai standar negara produsen. Perundingan yang dilaksanakan di fora OI Komoditas perundingan multilateral/plurilateral bersifat strategis karena menitikberatkan pada dukungan politis dan komitmen negara anggotanya melalui kesepakatan pemimpin atau pejabat negara. Langkah ini sering kali diperlukan untuk mengatasi hal-hal kritis yang menjadi masalah bagi ekonomi dan perdagangan dunia secara cepat.

Peran strategis Kerja Sama di Forum G20

G20 merupakan forum kerja sama ekonomi internasional terkemuka yang terdiri dari 20 anggota (19 negara dan Uni Eropa) dengan *Gross Domestic Product* (GDP) terbesar untuk mencari cara menghadapi berbagai tantangan utama ekonomi dunia, melalui dialog dan kebijakan politik para pemimpinnya. G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili 85 persen GDP dunia, 75 persen perdagangan global, dan dua-per-tiga penduduk dunia bermukim di negara-negara G20. Dengan kekuatan dan indikator-indikator ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara anggota, G20 memiliki modalitas yang kuat sebagai *main driver* kerja sama ekonomi dunia serta pengaruh yang besar bagi pengelolaan perekonomian global dan sistem finansial. Anggota G20 terdiri dari Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

Keanggotaan pada G20 telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci pada perekonomian global. G20 merupakan sarana strategis untuk dapat mengekstrapolasikan kepentingan nasional Indonesia ke level global. Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang juga menjadi anggota G20, keanggotaan di G20 juga berperan penting dalam memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia di ASEAN karena dapat menjadi jembatan suara kolektif negara-negara ASEAN untuk G20.

Pembahasan sektor perdagangan di G20 dilakukan melalui *G20 Trade and Investment Working Group* (TIWG). Perundingan G20 TIWG telah dilaksanakan oleh Presidensi RRT (2016), Presidensi Jerman (2017), Presidensi Argentina (2018), Presidensi Jepang (2019), Presidensi Arab Saudi (2020), Presidensi Italia (2021), Presidensi Indonesia (2022), Presidensi India (2023), Presidensi Brazil (2024), dan Presidensi Afrika Selatan (2025).

Kementerian Perdagangan sebagai instansi penjurur (*focal point*) Indonesia untuk G20 TIWG perlu terus berperan aktif dalam perundingan di sektor perdagangan dengan negara anggota G20, guna memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional Indonesia dan negara berkembang, serta menciptakan koherensi di tingkat multilateral/ plurilateral.

Peran Strategis Kerja Sama di Forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Developing Eight (D-8), IORA, dan CPTPP

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) didirikan di Rabat, Maroko, pada tanggal 25 September 1969. Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Maroko, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Seiring perkembangannya OKI berubah nama pada tanggal 28 Juni 2011 dari Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerja Sama Islam.

Pada *13th Session of the Islamic Summit Conference* tanggal 10-15 April 2016 di Istanbul, Turki, negara anggota menyepakati Target OIC-2025: *Program of Action*,

yang menetapkan target pertumbuhan perdagangan intra OKI hingga 25% pada 2025. Namun demikian, tantangan terbesar bagi OKI di bidang ekonomi dan perdagangan adalah masih rendahnya GDP sebagian besar negara anggota OKI dan tingginya kesenjangan ekonomi di antara negara anggota OKI.

Kerjasama perdagangan intra OKI diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi kendala dan ketimpangan ekonomi di antara negara-negara anggota. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara anggota, OKI mendirikan komisi khusus dalam struktur organisasinya, yaitu *The Standing Committee for Economic and Trade Cooperation (COMCEC)*. COMCEC telah menetapkan *COMCEC Strategy* yang terdiri dari dua instrumen penting, yaitu *COMCEC Working Group Meeting* dan *COMCEC Project Funding*. Kementerian Perdagangan merupakan instansi penjuror (*focal point*) Indonesia untuk *COMCEC Trade Working Group* terus aktif terlibat dalam implementasi program kerjasama peningkatan perdagangan dengan negara anggota OKI, termasuk melalui pemanfaatan *COMCEC Project Funding*.

Developing Eight (D-8) didirikan melalui Deklarasi Istanbul yang disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-1 D-8 pada tanggal 15 Juni 1997 di Istanbul, Turki. Pada KTT ke-5 D-8 tahun 2006 di Bali, para pemimpin negara D-8 menandatangani dua perjanjian perdagangan di antara negara anggota, yaitu D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) dan Multilateral Agreement among D-8 Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters (AACM).

Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan sekitar USD 4.8 triliun dan jumlah penduduk sekitar 1,15 miliar pada tahun 2020, D-8 merupakan salah satu *economic grouping* negara berkembang yang potensial. Berdasarkan prediksi *Price Waterhouse Coopers*, seluruh negara anggota D-8 akan berada dalam 25 negara dengan perekonomian terbesar pada 2050 sehingga D-8 dapat menjadi forum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. D8 juga dapat menjadi platform bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonomi di tingkat regional dan internasional serta mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.

Indian Ocean Rim Association (IORA) adalah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama regional dan pembangunan berkelanjutan antar negara-negara di kawasan Samudra Hindia. IORA beranggotakan 23 negara dan 12 mitra dialog. IORA memiliki 3 (tiga) *working group* yang bersifat permanen, yaitu (1) *Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG)*: mewakili kelompok akademisi; (2) *Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)*: mewakili kelompok pelaku usaha (KADIN); dan (3) *Working Group on Trade and Investment (WGTI)*: mewakili kelompok pemerintah.

Kementerian Perdagangan (c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan OI, Ditjen PPI), bersama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi instansi pengampu untuk *Working Group on Trade and Investment (WGTI)*. WGTI membahas enam (6) bidang prioritas, yaitu (1) *Maritime safety and security*; (2) *Trade and Investment Facilitation*; (3)

Fisheries management; (4) Disaster preparedness; (5) Academic, science and technology cooperation; dan (6) Tourism and cultural exchange.

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) merupakan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang komprehensif dan progresif antara 12 negara anggota di kawasan Indo-Pasifik. Setelah Amerika Serikat keluar dari TPP tahun 2017, 11 negara melakukan negosiasi ulang dan menghasilkan CPTPP yang ditandatangani pada 8 Maret 2018, dan mulai berjalan pada 30 Desember 2018. Inggris resmi bergabung menjadi anggota ke-12 CPTPP sejak 15 Desember 2024.

CPTPP mempertahankan perjanjian perdagangan bebas dengan level ambisius dan berstandar tinggi TPP yang mencakup komitmen pada beberapa aspek seperti perdagangan barang, investasi, perdagangan jasa dan mobilitas tenaga kerja, pengadaan pemerintah, fasilitasi perdagangan dan bea cukai, ketentuan asal barang, BUMN, serta HAKI.

PDB CPTPP (2023) sekitar USD 19 triliun atau mencakup 10,3% dari PDB global, populasi 518,4 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari populasi global, dan total perdagangan mencapai USD 7,1 triliun atau mencakup 15% dari perdagangan global. Ketua Komisi CPTPP tahun 2024 dipegang oleh Kanada, kemudian digantikan oleh Australia sebagai Ketua Komisi CPTPP untuk periode 2025.

Indonesia telah menyampaikan usulan aksesinya CPTPP melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Perdagangan Selandia Baru, selaku *depository country* CPTPP, pada tanggal 19 September 2024. Selandia Baru menyampaikan jawaban resmi pada tanggal 20 September 2024 dan telah mensirkulasikan permintaan aksesinya Indonesia kepada anggota CPTPP.

Menko Perekonomian juga telah bertemu dengan 12 Dubes negara anggota CPTPP di Jakarta pada tanggal 25 September 2024. Para Dubes secara umum menyambut baik rencana aksesinya Indonesia. Selain itu, lebih dari 6 (enam) negara anggota CPTPP mendukung rencana aksesinya Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kanada selaku *Chair Commission CPTPP 2024* dalam pertemuan 30 Desember 2024. Saat ini Indonesia dalam proses koordinasi penyiapan jawaban melengkapi kuesioner CPTPP.

Peran strategis Kerja Sama PBB (UNCTAD, UNESCAP, dll)

Peran strategis kerja sama PBB, termasuk organisasi seperti UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development/ Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan), UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/ Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik), serta organisasi internasional lainnya, sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kerja sama PBB menciptakan ruang untuk dialog antara negara-negara, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Forum PBB memungkinkan pertukaran ide, praktik terbaik, dan pengalaman yang penting untuk penyelesaian masalah global yang kompleks. Inisiatif PBB untuk mempromosikan dan mengawasi pencapaian

tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs. UNCTAD dan UNESCAP menerjemahkan tujuan global ini ke dalam kebijakan yang dapat diimplementasikan di tingkat nasional dan regional.

UNESCAP adalah suatu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. UNESCAP didirikan pada tahun 1947, dan berkedudukan di Bangkok, Thailand. Saat ini UNESCAP beranggotakan 53 negara. UNESCAP bertujuan memberikan solusi-solusi terhadap tantangan ekonomi dan pembangunan di kawasan dengan bantuan teknis dan capacity building kepada negara anggotanya dalam beberapa area yaitu: kebijakan makroekonomi dan pembangunan, perdagangan dan investasi, transportasi, pembangunan sosial, lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, informasi dan komunikasi teknologi serta manajemen resiko bencana, statistik, serta kegiatan sub-regional untuk pembangunan.

UNESCAP menyediakan forum pembangunan kerja sama kawasan untuk membantu negara anggota dalam membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Secara struktural, Komisi adalah organ legislatif utama ESCAP yang mengadakan pertemuan Tingkat Menteri setahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada UN's Economic and Social Council (ECOSOC). Komisi merupakan forum antar Pemerintah negara anggota untuk meninjau dan membahas isu-isu ekonomi dan sosial serta untuk memperkuat kerja sama regional di bidang sosial ekonomi. Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik adalah organ legislatif utama ESCAP dan laporan ke PBB Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Komisi menyediakan sebuah forum untuk semua pemerintah daerah untuk meninjau dan membahas isu-isu ekonomi dan sosial dan untuk memperkuat kerja sama regional. Pembahasan sektor perdagangan di UNESCAP melalui **Committee on Trade, Investment, Enterprise and Business Innovation** yang diadakan 2 (dua) tahun sekali dan **Paperless Trade Week**.

UNCTAD didirikan oleh PBB pada 1964, merupakan fokus PBB untuk isu terkait perdagangan dan pembangunan, serta isu terkait lainnya dalam keuangan, investasi, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk kepentingan negara-negara berkembang, Pada awalnya, UNCTAD fokus pada peningkatan peran negara-negara berkembang pada perdagangan internasional. Seiring berjalannya waktu, cakupan kerja UNCTAD diperluas, di antaranya meliputi investasi, ekonomi digital, persaingan usaha, logistik, transportasi, teknologi, dll. Melalui Pertemuan-pertemuan, UNCTAD mengidentifikasi dan menyepakati proyek-proyek capacity building, bantuan teknis, riset, penyusunan laporan, dan rekomendasi kebijakan.

Mandat pembentukan UNCTAD terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu (a) pembangunan konsensus (*consensus building*), melalui *policy dialogue* dan *norm-setting* dalam pertemuan UNCTAD serta sharing best practice, (b) riset dan analisis, yakni penguatan narasi, masukan kebijakan perdagangan melalui publikasi atau analisa kebijakan UNCTAD serta *knowledge partner* dan peningkatan kapasitas SDM, dan

(c) bantuan teknis (*technical assistance*), penyelenggaraan proyek kerja sama, capacity building, maupun pemanfaatan data dan expertise UNCTAD dalam isu perdagangan dan pembangunan pada konteks nasional. Arah kebijakan UNCTAD dirancang dan disepakati bersama oleh anggota PBB melalui Komite-Komite dan Trade and Development Board (TDB) dan dikukuhkan pada UNCTAD Ministerial Conference setiap 4 tahun yang telah diadakan tahun 2025. Sekretaris Jenderal UNCTAD, yang dipilih setiap 4 tahun, memimpin pengelolaan tugas harian UNCTAD. Pembahasan sektor perdagangan di UNCTAD melalui Trade and Development Board serta working group antara lain IGE on e-Commerce and the Digital Economy, Multi-year Expert Meeting on Trade, Services, and Development, serta Multi-year Expert Meeting on Commodities and Development.

ISU STRATEGIS

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 82 ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut, Kementerian Perdagangan telah berpartisipasi dan berperan aktif untuk mewakili Indonesia dalam berbagai perundingan dan kerjasama di forum kerja sama perdagangan yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral dengan negara lain.

Perundingan dan kerja sama juga dilakukan secara plurilateral dalam konteks regional dan multilateral serta lembaga/ organisasi internasional. Secara khusus, perundingan dan kerja sama yang tersebut meliputi *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan fora kerja sama perdagangan lainnya seperti *Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)*, *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)*, *International Coconut Community (ICC)*, *International Coffee Organization (ICO)*, *International Pepper Community (IPC)*, *International Tripartite Rubber Council (ITRC)*, *Group of Twenty (G-20)*, *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)*, *Developing Eight (D8)*, *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)*, *World Economic Forum (WEF)*, *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, dan organisasi internasional lainnya.

Isu Strategis Kerja Sama APEC

Isu utama dalam kerja sama akses perdagangan dan akses investasi APEC meliputi: (1) penguatan dukungan terhadap Sistem Perdagangan Multilateral yang tengah menghadapi tantangan kredibilitas, khususnya dalam fungsi perundingan, monitoring, dan penyelesaian sengketa; (2) percepatan integrasi ekonomi regional guna memperluas akses pasar di kawasan Asia-Pasifik sesuai semangat perdagangan bebas, terbuka, dan adil sebagaimana tercermin dalam Bogor Goals, Putrajaya Vision (PV) 2040, dan Aotearoa Plan of Action (APA); (3) implementasi PV 2040 dan APA secara konkret; (4) penguatan daya saing dan orientasi ekspor UMKM; (5) pengarusutamaan inklusivitas dan keberlanjutan dalam kerja sama ekonomi kawasan; (6) promosi perdagangan dan investasi

untuk memperlancar arus perdagangan dan penanaman modal; serta (7) peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional.

Pembahasan isu-isu tersebut diharapkan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, iklim usaha yang stabil dan prediktif, serta kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan menuju pasar Asia-Pasifik yang semakin terintegrasi. Hal ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif Indonesia di APEC sebagai platform strategis untuk membangun konsensus tata kelola perdagangan internasional yang seimbang, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional dari praktik perdagangan yang tidak adil.

Isu Strategis Kerja Sama OECD dan Forum Kerja Sama Ekonomi Lainnya

Isu utama yang dibahas dalam forum kerja sama OECD bersifat *evidence-based analysis* dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas dan transformasi kebijakan domestik negara anggota terhadap isu-isu perdagangan global. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional memiliki tugas dan fungsi untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai forum perundingan OECD, antara lain pada *Ministerial Council Meeting, Trade Committee Meeting, Working Party on Trade Committee Meeting, Working Party on Countering Illicit Trade, Joint Working Party on Trade and Environment Meeting, dan Joint Working Party on Agriculture and Trade Meeting, dan Joint Working Party on Tax and Environment*.

Adapun sejumlah isu strategis utama yang dibahas dalam perundingan OECD di tahun 2025, antara lain mencakup: 1) pembaruan OECD on International Trade Developments serta rilis OECD Kuartal I/II 2025; 2) promosi dan utilisasi hasil-hasil penelitian di bawah Komite Perdagangan OECD serta penguatan komunikasi dan outreach; 3) ketahanan dan diversifikasi rantai pasok, termasuk tren Global Value Chains (GVCs) dan partisipasi melalui aliran barang dan jasa modal; 4) pembahasan Critical Raw Materials (CRM) dan implikasi kebijakan perdagangan, termasuk persyaratan intensitas karbon tingkat-produk dan Border Carbon Adjustment; 5) peran perjanjian perdagangan internasional dalam mendukung inisiatif keberlanjutan dan berwawasan lingkungan; 6) fasilitasi perdagangan melalui pendekatan Going Paperless serta pengembangan OECD Trade Facilitation Indicators (TFIs); 7) pengembangan dan pemanfaatan Trade in Value-Added Modes of Supply (TiVA MoS) Database; 8) perkembangan dan aktivitas OECD Services Trade Restrictiveness Index (STRI); 9) instrumen pengakuan timbal balik, termasuk Mutual Recognition Agreements (MRAs) dan Mutual Recognition Instruments (MRIs); 10) isu perdagangan jasa dan daya saing ekspor jasa, termasuk keterkaitannya dengan penyerapan tenaga kerja; 11) metodologi penghitungan dan kuantifikasi perdagangan digital; 12) adopsi dan difusi Artificial Intelligence (AI) serta digitalisasi dalam fasilitasi perdagangan; 13) aliran data lintas batas bagi non-personal data (NPD); 14) ketentuan terkait Indigenous Peoples dalam perjanjian perdagangan internasional; 15) agenda Joint Working Party on Trade and Environment (JWPTE); 16) perkembangan forum internasional terkait Future of Investment and Trade (FIT) Partnership; serta 17) dukungan

terhadap rencana Program Kerja dan Anggaran OECD 2027–2028, khususnya penguatan instrumen data dan analisis seperti Basis Data Perdagangan Bernilai Tambah, STRI, TFIs, dan data industri manufaktur.

Puncak pertemuan OECD terefleksikan dalam *Ministerial Council Meeting*, yang telah dilaksanakan pada 3 – 4 Juni 2025, di Paris, Prancis. Kosta Rika selaku *Chair* mendorong pembahasan atas 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. Pilar I – *Resilience*. Penanganan krisis dan mitigasi melalui dialog serta memastikan kesetaraan di antara negara-negara dan mengatasi gangguan rantai pasok.
2. Pilar II – *Inclusiveness*. Perubahan menuju adopsi digital, konektivitas, serta menjembatani kesenjangan digital yang menguntungkan pekerja dan industri yang mencakup perlindungan data, partisipasi perempuan dalam sektor digital, serta etika bisnis dalam transformasi digital.
3. Pilar III – *Sustainability*. Kebijakan inovatif yang mendorong solusi pengendalian perubahan iklim melalui sektor perdagangan dan investasi, investasi yang mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk peran OECD dalam mitigasi perubahan iklim di kawasan Indo-Pasifik.

Isu utama yang dibahas dalam proses akses keanggotaan ke OECD mencakup isu-isu yang terdapat dalam instrumen hukum OECD antara lain perdagangan yang terbuka dan transparan, pemberian kredit ekspor pemerintah yang bertanggung jawab dan tidak ditujukan untuk subsidi, serta dukungan pembiayaan dan kebijakan yang kondusif (termasuk transisi hijau dan digital) bagi UMKM dan Wirausaha. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional bertanggung jawab dalam memastikan kesesuaian peraturan dan kebijakan domestik terhadap instrumen hukum OECD terkait Komite Bidang Perdagangan.

Isu strategis G20 (*Trade and Investment*)

Terdapat 4 (empat) isu prioritas yang diangkat pada pertemuan G20 *Trade and Investment Working Group* (TIWG) Presidensi Afrika Selatan tahun 2025 yaitu (1) *Trade and Inclusive Growth*; (2) *Responsive Trade and Investment Agenda*; (3) *G20 Framework on Green Industrialisation and Investments*; dan (4) *WTO Reform*. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) telah menghadiri seluruh rangkaian pertemuan TIWG pada Presidensi G20 Afrika Selatan 2025. Pertemuan TIWG membahas keempat isu prioritas dimaksud sebagai bagian dari pembahasan pada forum *Trade and Investment Ministers Meeting* (TIMM). Aspek-aspek kepentingan perdagangan Indonesia yang akan diperjuangkan pada Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 adalah sebagai berikut:

- **Isu prioritas 1 – *Trade and Inclusive Growth***: Indonesia mendorong penguatan dimensi pembangunan (*development dimension*) dalam perdagangan internasional, termasuk pemberian ruang kebijakan (*policy space*) bagi negara berkembang untuk melaksanakan industrialisasi, hilirisasi, serta

transformasi struktural guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- **Isu prioritas 2 – *Responsive Trade and Investment Agenda***: Indonesia mendorong agar agenda perdagangan dan investasi G20 responsif terhadap tantangan global, termasuk penguatan ketahanan rantai pasok, ketahanan pangan, transisi energi, serta peningkatan kerja sama investasi yang mendukung pembangunan industri domestik dan penciptaan lapangan kerja.
- **Isu prioritas 3 – *G20 Framework on Green Industrialisation and Investments***: Indonesia mendorong pengembangan kerangka kerja yang mendukung industrialisasi hijau melalui penguatan nilai tambah komoditas dan mineral kritis di negara asal, fasilitasi alih teknologi, serta akses pembiayaan yang terjangkau guna mendukung transisi energi yang adil dan pembangunan industri berkelanjutan.
- **Isu prioritas 4 – *WTO Reform***: Indonesia mendorong reformasi WTO yang inklusif dan berorientasi pembangunan, termasuk pemulihan fungsi *Dispute Settlement Mechanism/Appellate Body*, penguatan prinsip *Special and Differential Treatment* (S&DT), serta penguatan sistem perdagangan multilateral untuk menjaga stabilitas dan kepastian perdagangan global.

Isu strategis BRICS (*Economic and Trade*)

Terdapat sejumlah isu prioritas yang diangkat pada pertemuan BRICS *Contact Group on Economic and Trade Issues* (CGETI) Presidensi Brasil di tahun 2025, yang pada prinsipnya berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antar negara anggota BRICS. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) telah menghadiri rangkaian pertemuan CGETI dalam rangka Presidensi BRICS 2025. Pertemuan CGETI membahas isu-isu strategis yang mendukung penguatan peran BRICS dalam tata kelola ekonomi global. Aspek-aspek kepentingan perdagangan Indonesia yang akan diperjuangkan adalah sebagai berikut:

- **Isu prioritas 1 – *Strengthening Intra-BRICS Trade and Economic Cooperation***: Indonesia mendorong peningkatan akses pasar dan fasilitasi perdagangan antar negara BRICS, termasuk pengurangan hambatan non-tarif, peningkatan transparansi regulasi, serta penjajakan kerja sama konkret yang mendukung diversifikasi pasar ekspor Indonesia.
- **Isu prioritas 2 – *Reform of Global Economic Governance***: Indonesia mendorong penguatan peran negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global, termasuk reformasi lembaga keuangan internasional dan sistem perdagangan multilateral agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
- **Isu prioritas 3 – *Digital Economy and Sustainable Development***: Indonesia mendorong kerja sama ekonomi digital yang inklusif, termasuk interoperabilitas sistem pembayaran, penguatan UMKM dalam perdagangan digital, serta kerja

sama teknologi yang mendukung transformasi industri dan pembangunan berkelanjutan.

- **Isu prioritas 4 – Resilient Supply Chains and Industrial Cooperation:** Indonesia mendorong penguatan kerja sama industri dan rantai pasok yang tangguh, termasuk pengembangan nilai tambah komoditas strategis dan mineral kritis, serta fasilitasi investasi yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Isu strategis Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Developing Eight (D-8)

Salah satu isu strategis yang penting bagi OKI adalah bagaimana meningkatkan efektivitas organisasi dalam memperjuangkan isu-isu penting yang berkaitan dengan Islam, seperti perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia. OKI perlu terus berinovasi dan mengembangkan program-program kerja sama yang konkrit dan berdampak positif bagi anggota OKI, serta memperkuat hubungan dengan organisasi-organisasi lain di tingkat regional dan internasional.

Sementara itu, untuk D-8, isu strategis yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kerja sama *Preferential Trade Agreement among Developing Eight Member States* (PTA D-8) yang telah disepakati oleh anggota, namun pelaksanaan perjanjian ini masih menunggu keputusan dari *supervisory committee* D-8. D-8 perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan inovasi, serta memperkuat kerja sama di bidang infrastruktur dan energi.

Isu Strategis Kerja Sama PBB (UNCTAD, UNESCAP, dll) dan Organisasi Internasional Lainnya

Isu utama yang dibahas dalam forum kerja sama UNESCAP bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial melalui kerja sama dan integrasi regional dan subregional. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional memiliki tugas dan fungsi untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai forum perundingan UNESCAP, antara lain:

- *Committee on Trade, Investment, Enterprise, and Business Innovation* yang membahas mekanisme dan perjanjian kerja sama regional dalam perdagangan dan investasi untuk pengembangan negara anggota serta kebijakan yang mendukung fasilitasi perdagangan.
- Paperless Trade Week untuk mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam digitalisasi rantai pasokan, serta mendukung negara anggota dalam digitalisasi perdagangan, terutama melalui implementasi *Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless Trade in Asia and the Pacific* (CPTA).

Sejumlah isu strategis utama yang dibahas dalam UNCTAD antara lain: (i) interdependensi dan strategi pembangunan, (ii) investasi untuk pembangunan berkelanjutan, (iii) tantangan dan peluang yang dihadapi negara berkembang

dalam perdagangan internasional, (iv) perdagangan digital, dan (v) rekomendasi dan kebijakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia.

Beberapa isu organisasi internasional lainnya antara lain:

- UNCTAD *eTrade Readiness Assessment* merupakan kerja sama Pemerintah RI dengan UNCTAD dengan tujuan meninjau tingkat kematangan ekosistem dan perdagangan digital Indonesia.
- *Artificial Intelligence Action Summit (AIAS)*, pertemuan diadakan oleh pemerintah Perancis dan akan membahas ekosistem AI, dampak AI, dan integrasi penggunaan AI dalam setiap sektor.
- Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) terdiri dari 2 working group membahas transformasi digital dan perjanjian bilateral, regional, serta multilateral. Pertemuan turut membahas strategi prioritas pembangunan nasional untuk peningkatan kerja sama dengan Badan - Badan PBB di Indonesia.
- Kerja sama Selatan - Selatan dan Triangular (KSST), telah diadakan FGD oleh Kementerian Perindustrian untuk membahas identifikasi dan evaluasi kerja sama teknik di bidang industri sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2025 dalam kerangka kerja sama KSST.

PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN 2025-2029

Usaha pencapaian sastrategis dalam kerja sama perdagangan internasional pada periode 2025–2029 diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin berat seiring dengan perubahan lanskap perekonomian global yang semakin dinamis dan kompetitif. Ketidakpastian ekonomi dunia, meningkatnya rivalitas geopolitik seperti Amerika Serikat-China dan Rusia-Ukraina, serta kecenderungan penguatan kebijakan industri dan proteksionisme di berbagai negara diperkirakan akan mempengaruhi stabilitas sistem perdagangan global dan akses pasar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, semakin kuatnya dorongan penerapan standar keberlanjutan, ekonomi hijau, serta regulasi terkait perdagangan digital menuntut kemampuan adaptasi kebijakan nasional agar tetap selaras dengan perkembangan agenda global. Dalam berbagai forum kerja sama ekonomi internasional seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Group of Twenty (G20), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Developing-8 Organization for Economic Cooperation (D-8), dan Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk semakin aktif memperjuangkan kepentingan nasional di tengah semakin kompleksnya isu-isu yang berkembang, mulai dari ketahanan rantai pasok global, transformasi ekonomi digital, hingga upaya transisi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, dalam forum organisasi komoditas internasional seperti International Coffee Organization (ICO), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), dan International Pepper Community (IPC), Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak kalah signifikan, antara lain volatilitas harga komoditas global, meningkatnya tuntutan transparansi dan keberlanjutan dalam rantai pasok, serta potensi munculnya berbagai hambatan perdagangan non-tarif yang dapat mempengaruhi daya saing komoditas ekspor unggulan Indonesia. Sementara itu, dinamika kerja sama ekonomi kawasan Asia dan Pasifik yang berkembang dalam forum United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) turut menyoroti pentingnya penguatan integrasi ekonomi kawasan, peningkatan konektivitas perdagangan, serta penguatan kerja sama dalam menghadapi berbagai risiko ketidakpastian global. Berbagai perkembangan tersebut menuntut Indonesia untuk terus memperkuat posisi strategisnya dalam forum-forum internasional guna memastikan kepentingan nasional tetap terakomodasi, sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong terciptanya sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, inklusif, dan berkeadilan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional didasarkan pada Kegiatan Prioritas Bidang Ekonomi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan dalam Program Peningkatan Perundingan Perdagangan Internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan visi dan misi Ditjen PPI yang merupakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia serta misi Kementerian Perdagangan, Ditjen PPI mengemban 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional;
2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional;
3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Ditjen PPI, DPAKOI mendukung visi dan misi Ditjen PPI yaitu pada peningkatan akses pasar Indonesia di pasar internasional melalui perundingan di forum antar kawasan dan organisasi internasional dan menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional.

Peningkatan akses pasar di forum antar kawasan dan organisasi internasional lainnya dilakukan melalui perundingan perdagangan yang intensif untuk membuka akses pasar dan fasilitasi perdagangan. Perwujudan tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia dilakukan melalui perundingan perdagangan yang berkualitas untuk mengajukan kepentingan perdagangan Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional.

Sementara itu, melalui keterlibatan pada berbagai fora organisasi komoditi internasional, dapat diupayakan stabilisasi harga komoditas melalui upaya diplomasi pada perundingan berbagai organisasi komoditi internasional dimaksud. Secara khusus, masing-masing organisasi memiliki mekanisme tertentu, seperti ITRC yang memiliki mekanisme *Supply Management Scheme (SMS)*, *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)*, dan *Strategic Market Operation (SMO)*. Keempat organisasi lainnya memiliki mekanisme stabilisasi harga secara eksplisit yang dibahas dalam agenda pelaporan situasi pasar komoditas dan pelaporan

data statistik. Kedua pembahasan agenda tersebut akan mengerucut pada pembahasan stabilisasi harga komoditas yang didasarkan pada situasi pasar dan tranparansi data statistik negara anggota. Berdasarkan agenda pembahasan dimaksud, organisasi komoditas internasional mengeluarkan laporan resmi harga komoditas internasional pada situs mereka. Laporan ini juga secara rutin disampaikan kepada para petani di tingkat domestik, seperti informasi harga lada melalui sms yang diberikan oleh IPC bagi petani terdaftar di Indonesia.

Target kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada tahun 2025 fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional; 2) Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia; dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini: 3) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan Antar Kawasan dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Tabel 4.
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2025 BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS DJPPI

Sasaran / Indikator	Target				
	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional					
Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional (Kegiatan)	4	4	5	5	6
Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia					
Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	80	80	80	80	80
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	77	79	81	83	85

Sumber: DPAKOI (2026)

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencakup Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran, sebagaimana terdapat pada Lampiran 2. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja DPAKOI tahun 2025, dimana secara keseluruhan terdapat tiga Indikator Kinerja dari dua Sasaran Program yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Tabel. 5 Perjanjian Kinerja DPAKOI Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	6 (kegiatan)
2	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80 (persen)
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	85 (persen)

Sumber: DPAKOI (2026)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kendala pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kinerja Nomor: 01/PPI/PK/01/2021, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2025 terdiri dari 3 Sasaran Program ditunjang dengan 3 Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif selama periode Tahun 2025. Perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2025 menggunakan metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja: Rumus perhitungan ini digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin besar nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi} \times 100\% \text{ Target}$$

Tahun 2025 merupakan tahun yang masih mengacu pada pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024 dan RENSTRA serta program Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) memiliki tiga sasaran strategis dan tiga indikator kinerja strategis yang menggambarkan kinerjanya merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing indikator akan dilaporkan realisasi dan capaian secara periodik tiga bulanan, untuk mengetahui dan mengukur perkembangannya. Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan target 2024 sesuai dengan RENSTRA 2020-2024. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dalam pengukuran kegiatan melakukan evaluasi pertiga bulan selama, empat kali selama setahun dalam bentuk Pencapaian Program Sasaran (PPS) maka terdapat PPS pada triwulan I, II, III dan IV pada tahun 2024. Dalam rangka peningkatan kerja sama perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan

Organisasi Internasional Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional				
1	Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional	Kegiatan	6	6	100
2.	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
2	Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	91.3	114.1
3.	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional				
3	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	Persen	85	86.7	102
Rata-rata Capaian Tahun 2025					105.4

Sumber: DPAKOI (2026)

Terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan, yaitu meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia, dan Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional.

Dalam sasaran meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dengan indikator kinerja jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional mencakup 3 (tiga) indikator kinerja yang terdiri dari:

- a. Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.
- b. Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional.
- c. Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional.

Sasaran Program 1
Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

Indikator Kinerja Program 1:

Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

Cara Perhitungan:

$$KS_t = \sum KS_{jt}$$

KS_t= Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan

KS_{jt}= Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

INDIKATOR	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (kegiatan)	6	6	100	6	6	100

Sumber: DPAKOI (2026)

Untuk Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir tidak terdapat sumber pendukung.

Tabel 8. Rincian Target Indikator Kinerja DPAKOI 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	Rincian Target	REALISASI	PERSENTASE
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	(6 kegiatan)	Kegiatan APEC Akses: CTI 1, CTI 2, MRT, CTI 3, AELW	6 kegiatan	100%
		Kegiatan APEC Fasilitas: CTI 1, CTI 2, MRT, CTI 3, AELW		
		Kegiatan Komoditi		
		Kegiatan D8/OKI: COMCEC TWG		
		Kegiatan OI Lainnya: UNESCAP, OECD, CPTPP		

Sumber: DPAKOI, (2026)

Integrasi ekonomi melalui perdagangan internasional akan melahirkan kompetisi yang berujung pada peningkatan kegiatan akses pasar yang dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan. Di sisi lain, keterbukaan akses pasar barang antar negara memberikan dampak bagi keterbukaan informasi dan komunikasi.

B. KEGIATAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Forum Antar Kawasan fokus pada peningkatan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan kawasan melalui kerja sama teknis antar anggota Ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Berbagai inisiatif yang diajukan oleh Ekonomi proponen memberikan dampak positif dalam penyusunan kebijakan berdasarkan praktik terbaik untuk memfasilitasi perdagangan yang diharapkan dapat berdampak secara positif pada peningkatan akses pasar barang.

1. Kerja Sama APEC

Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting

Pada 15–16 Mei 2025, Delegasi DPAKOI mendampingi Menteri Perdagangan RI sebagai delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri perdagangan APEC 2026 di Jeju, Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perdagangan menekankan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral yang kredibel dan inklusif di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan praktik tarif resipokal. Indonesia menegaskan dukungan terhadap reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan penyelesaian isu perikanan serta pertanian secara adil.

Terkait transformasi digital, Menteri Perdagangan mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dan *paperless trade* untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan rantai pasok. Namun, Indonesia mengingatkan agar digitalisasi

perdagangan tetap inklusif melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas, khususnya bagi UMKM.

Dalam isu perdagangan berkelanjutan, Indonesia menegaskan bahwa agenda hijau harus mendorong inovasi dan ketahanan ekonomi tanpa menjadi hambatan terselubung bagi negara berkembang. Menteri Perdagangan juga menyampaikan langkah domestik, termasuk peluncuran Bursa Karbon Nasional dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, sebagai bagian dari komitmen transisi energi.

Di sela-sela pertemuan, Menteri Perdagangan RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan enam mitra strategis APEC, yaitu Selandia Baru, Korea Selatan, Chili, Singapura, dan Jepang, serta Direktur Jenderal WTO. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas penguatan akses pasar, percepatan implementasi perjanjian perdagangan, serta koordinasi dukungan terhadap agenda reformasi WTO menjelang KTM ke-14 tahun 2026.

Gambar 2. Menteri Perdagangan RI, Direktur Jenderal World Trade Organisation dan Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional di sela Pertemuan APEC *Minister Responsible for Trade Meeting (MRT) 2025*



Sumber: Humas Kemendag

Third APEC Committee on Trade and Investment (CTI 3) Meeting

Pada 11–12 Agustus 2025, Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI), Kementerian Perdagangan, memimpin Delegasi RI pada Pertemuan Ketiga Committee on Trade and Investment (CTI3) APEC di Incheon,

Korea Selatan, didampingi Atase Perdagangan KBRI Seoul. Pertemuan membahas agenda prioritas APEC 2025 yang selaras dengan Putrajaya Vision 2040 dan Aotearoa Plan of Action (APA), mencakup dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, integrasi ekonomi kawasan, fasilitasi perdagangan dan digitalisasi, serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan sistem perdagangan multilateral, Indonesia menegaskan dukungan terhadap reformasi WTO, khususnya pemulihan *Dispute Settlement Mechanism* (DSM), penyelesaian subsidi perikanan dan pertanian, serta capaian inklusif dan seimbang pada KTM WTO ke-14. Terkait moratorium bea masuk atas transmisi elektronik (CDET), Indonesia menegaskan komitmen untuk menghormati proses perundingan di WTO.

Pada isu integrasi kawasan, APEC menyepakati kerangka kerja *Capacity Building Needs Initiative* (CBNI) ke-5, sementara sejumlah isu ketenagakerjaan dan BUMN masih dalam pembahasan. Indonesia juga menyampaikan perkembangan kerja sama RCEP dan menyambut aksesinya Chile serta Hong Kong–China.

Di bidang fasilitasi perdagangan dan digitalisasi, Ekonomi APEC mencatat berbagai inisiatif terkait e-commerce, UMKM, rantai pasok tangguh, serta non-tariff measures. Ekonomi APEC mengapresiasi dan menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam dua workshop inisiatif Indonesia di Jakarta, yaitu “Workshop Towards a Digital Trade Ecosystem in the Asia Pacific Region” (29–30 September 2025) dan “Best Practices on Trade Facilitation for MSMEs, including Women-Owned MSMEs” (6–7 November 2025).

Gambar 3. Perwakilan Delegasi RI berpartisipasi pada *Third APEC Committee on Trade and Investment (CTI 3) Meeting*



Sumber: APEC Korea 2025

APEC Economic Leaders Week (AELW) Meeting

Pada 30 Oktober 2025, Menteri Perdagangan RI bersama Menteri Luar Negeri RI memimpin Delegasi Republik Indonesia pada APEC Ministerial Meeting (AMM) ke-36 di Gyeongju, Korea Selatan. Menteri Perdagangan RI juga mendampingi Presiden RI dalam rangkaian APEC Economic Leaders' Meeting (AELM) pada 31 Oktober–1 November 2025, guna memastikan kesinambungan posisi Indonesia dari tingkat menteri hingga pemimpin ekonomi.

Pertemuan AMM mengangkat dua tema utama, yaitu *Innovation and Prosperity* serta *Connect*. Pada sesi *Connect*, Menteri Perdagangan RI menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama kawasan di tengah tantangan geopolitik, perubahan iklim, dan fragmentasi rantai pasok global. Indonesia menyoroti potensi kecerdasan artifisial (AI) untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan, dengan tetap menekankan tata kelola data yang transparan, pemerataan akses teknologi, serta penguatan infrastruktur digital agar transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Perdagangan RI juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dengan WTO sebagai pilar utama sistem perdagangan global. Indonesia mendorong reformasi WTO agar lebih transparan, adil, dan inklusif, termasuk pemulihan fungsi sistem penyelesaian sengketa. Indonesia menyatakan dukungan terhadap capaian substantif dan seimbang pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-14 tahun 2026 guna menjaga sistem perdagangan global yang terbuka dan berbasis aturan.

Pertemuan tersebut menghasilkan *APEC Joint Ministerial Statement 2025* dan *Chair's Statement* yang menegaskan komitmen pada reformasi WTO, penguatan integrasi ekonomi kawasan melalui FTAAP, fasilitasi perdagangan dan investasi, ketahanan rantai pasok, transformasi digital inklusif, serta dukungan terhadap UMKM dan pemberdayaan perempuan.

Di sela-sela AMM 2025, Menteri Perdagangan RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Hongkong–China, Rusia, dan Meksiko untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan memperluas akses pasar Indonesia.

Gambar 4. Menteri Perdagangan RI didampingi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada Pertemuan APEC Ministerial Meeting (AMM) 2025



Sumber: Humas Kemendag

2. Kerja Sama OECD dan Forum Kerja Sama Ekonomi Lainnya

OECD Working Party of The Trade Committee dan Trade Committee

Sebagai salah satu kandidat negara akses ke OECD, Indonesia dipandang perlu berpartisipasi aktif dalam forum kerja sama OECD guna mendorong familiarisasi pertemuan dan pemahaman ruang lingkup perundingan. Pada tahun 2025, Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah berpartisipasi aktif pada pertemuan *OECD Working Party of the Trade Committee (WPTC)* 13-14 Maret 2025 secara daring, WPTC 16-17 Juni 2025 secara daring, *Joint Working Party on Tax and Environment (JWPTXE)* 8 Oktober 2025 secara daring, WPTC 9-10 Oktober 2025 secara daring, Bilateral dengan *Trade and Agriculture Directorate OECD* 14 Oktober 2025 (*on-site*), *Trade Committee (TC)* 16 Oktober 2025 (*on-site*) dan WPTC (*on-site* Setditjen PPI) pada 11-12 Desember 2025.

Dalam rangkaian pertemuan Working Party of the Trade Committee (WPTC) dan Trade Committee (TC) OECD tahun 2025, pembahasan mencakup isu ketahanan dan diversifikasi rantai pasok, termasuk penguatan kerangka analisis berbasis data untuk memetakan disrupsi perdagangan global. Pada kajian Trade and Supply Chain Resilience serta Supply Chain Diversification, Indonesia

mendukung pengembangan pendekatan berbasis statistik perdagangan guna melengkapi pemetaan risiko rantai nilai global.

Dalam pembahasan *Leveraging International Trade of Critical Mineral*, Indonesia menyampaikan pentingnya mempertimbangkan dimensi pengembangan industri dan penciptaan nilai tambah domestik dalam membaca kebijakan terkait mineral kritis. Sementara itu, pada kajian *Trade Policy Implications of Product-Level Carbon Intensity Requirement* dan isu *Border Carbon Adjustment*, Indonesia menekankan perlunya analisis yang memperhatikan kesiapan kapasitas pelaku usaha, termasuk UMKM, serta perbedaan tingkat perkembangan antarnegara. Indonesia juga mengusulkan penguatan bagian “*Way Forward*” pada dokumen *OECD on International Trade Developments* guna memberikan arah kebijakan yang lebih operasional dalam merespons dinamika fragmentasi perdagangan global.

Isu fasilitasi perdagangan turut menjadi agenda utama, khususnya perkembangan *OECD Trade Facilitation Indicators (TFIs)*. Indonesia mencermati capaian skor agregat 1,418 serta mengidentifikasi area yang masih dapat ditingkatkan, antara lain *advance rulings*, *automation*, dan kerja sama antar instansi perbatasan. Indonesia juga menyampaikan pembaruan perkembangan reformasi nasional guna mendukung akurasi data TFI, dan OECD menyatakan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan organisasi regional serta *contact points* nasional dalam proses pemutakhiran data.

Dalam pengembangan *Digital Trade Facilitation Indicator* serta inisiatif *Going Paperless Trade*, Indonesia menyampaikan masukan agar pengembangan indikator baru selaras dengan kerangka TFI yang telah ada serta dilengkapi analisis komparatif untuk memperkuat konsistensi metodologis. Indonesia juga menyoroti pentingnya analisis dampak implementasi digitalisasi fasilitasi perdagangan terhadap pelaku usaha, termasuk UMKM, guna mendukung proses transisi yang efektif.



Gambar 5. Pertemuan *OECD Working Party of The Trade Committee* dan *Trade Committee*

Pembahasan perdagangan jasa dan keterkaitannya dengan tenaga kerja dilakukan melalui berbagai forum, termasuk Services Trade Workshop. Indonesia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif berbasis rantai nilai dalam mengukur daya saing sektor jasa serta pemanfaatan instrumen analitis seperti Services Trade Restrictiveness Index (STRI) dan Trade in Value Added (TiVA) dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Dalam diskusi Services and Workers, Indonesia menyoroti potensi sektor tradable services dalam memperluas kesempatan kerja dan memperkuat integrasi regional.

Terkait pengembangan Mutual Recognition Instruments (MRIs), Indonesia mendukung penguatan sinergi antara fasilitasi perdagangan dan pengakuan timbal balik melalui kerja sama multilateral dan regional. Indonesia juga menyampaikan potensi eksplorasi sektor halal dalam konteks pengakuan bersama guna meningkatkan efisiensi sertifikasi dan memperkuat kepercayaan pasar.

Pada isu perdagangan digital, OECD membahas metodologi estimasi perdagangan digital, kesiapan adopsi Artificial Intelligence melalui indikator TRADAI, serta kajian mengenai aliran lintas batas data non-personal (NPD). Indonesia menyampaikan masukan agar asesmen kesiapan AI turut mempertimbangkan aspek implementasi kebijakan di tingkat domestik. Dalam kajian NPD, Indonesia menekankan pentingnya klasifikasi sektor usaha berdasarkan skala untuk memperoleh gambaran dampak kebijakan yang lebih terukur.

Pembahasan perdagangan dan lingkungan mencakup pembaruan metodologi OECD Inventory of Support Measures for Fossil Fuels serta penguatan sinergi perdagangan dan agenda iklim menjelang COP30. Diskusi menyoroti pentingnya komparabilitas data dan transparansi metodologi dalam penyusunan inventori dukungan bahan bakar fosil.

Dalam agenda perdagangan dan Indigenous Peoples, OECD melanjutkan penyusunan kajian mengenai peran dan tantangan partisipasi masyarakat adat dalam perdagangan internasional. Indonesia mengikuti perkembangan ini dengan menekankan pentingnya pendekatan yang selaras dengan kerangka kebijakan nasional masing-masing negara.

Secara keseluruhan, partisipasi Indonesia dalam rangkaian pertemuan OECD tahun 2025 menunjukkan kontribusi aktif dalam penguatan instrumen analisis, penajaman metodologi, serta penyampaian perspektif kebijakan nasional pada berbagai agenda perdagangan internasional.

3. Kerja Sama Organisasi Komoditas Kelapa, Lada dan Sawit

Hasil Pertemuan International Coconut Community (ICC)

Sejak tahun 1976, kantor Sekretariat ICC berbasis di Jakarta dan dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Sebagai salah satu anggota pendiri ICC, Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif strategis di dalamnya. Ini termasuk menjadi anggota Technical Working Group yang merupakan tim inti penyusunan kebijakan di ICC; mendukung penyediaan data statistik; dan menjadi *host country* Sekretariat ICC. Saat ini, posisi Direktur Eksekutif ICC dipegang oleh perwakilan Indonesia, yang membantu meningkatkan pengaruh dan visibilitas Indonesia dalam ICC.

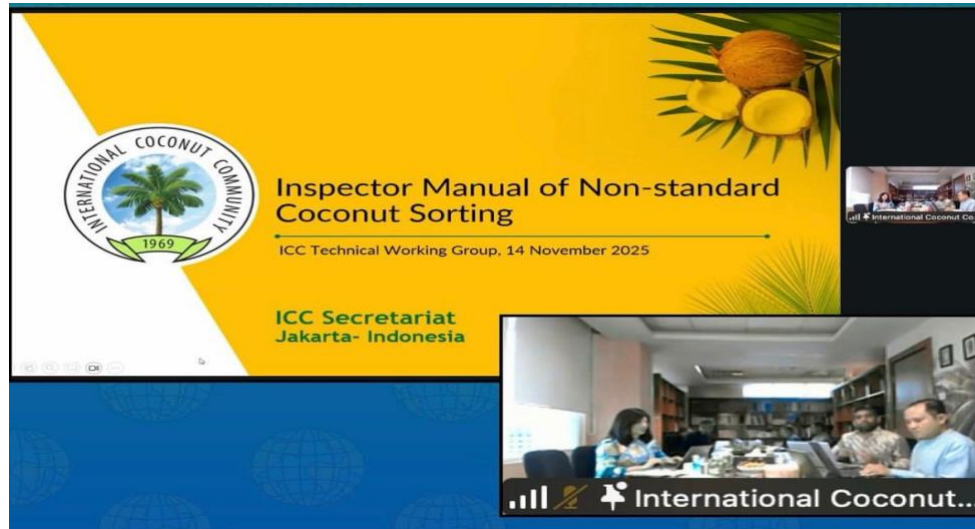
Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah dalam Sesi Tahunan ke-59/Pertemuan Tingkat Menteri Komunitas Kelapa Internasional (International Coconut Community/ICC) di Bandar Lampung pada 5 - 7 Desember 2023. Sesi Tahunan ke-59 ICC dibuka oleh Menteri Perdagangan RI dan dihadiri oleh perwakilan 15 negara anggota ICC termasuk Menteri Pariwisata, Perdagangan, Industri, dan Koperasi Kiribati dan Wakil Menteri Pertanian dan Perikanan Samoa, serta perwakilan organisasi internasional.

Pada Pertemuan Sesi Tahunan ke-59 ICC, Indonesia menyampaikan laporan negara mengenai situasi kelapa dan industri kelapa di Indonesia. Indonesia juga berperan aktif dalam merevisi Rencana Strategis lima tahun ICC, dengan fokus pada pencapaian Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menekankan keterlibatan perempuan dan anak muda dalam sektor kelapa.

Bergabungnya Pantai Gading sebagai anggota baru diharapkan akan meningkatkan posisi tawar negara-negara anggota ICC dalam industri kelapa. Indonesia juga mendukung Papua Nugini sebagai penyelenggara Hari Kelapa Sedunia tahun 2024, yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program PBB sebagai upaya meningkatkan pemahaman global akan pentingnya kelapa dalam kehidupan sehari-hari serta mengapresiasi kontribusinya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Perdagangan selaku instansi penjuror berpartisipasi aktif pada kegiatan yang diselenggarakan oleh ICC diantaranya:

- Pertemuan Technical Working Group (TWG) Meeting ICC.



Gambar 6. Pertemuan TWG Meeting ICC di Jakarta, Indonesia

Pertemuan TWG Meeting ICC diselenggarakan pada tanggal 14 November 2025 di Jakarta, Indonesia. Pertemuan ini sebagai pertemuan pendahuluan dari Rangkaian Sesi Tahunan dan Pertemuan Tingkat Menteri ICC ke-61 yang dilaksanakan secara virtual.

Pertemuan membahas beberapa topik mencakup: 1) Usulan modul pelatihan bagi pengawas yang bertugas menyortir kelapa Non-Standar (NS) untuk bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF); 2) Persiapan penyelenggaraan Konferensi dan Seminar International COCOTECH ke-52; 3) Usulan kegiatan/program internasional di tahun 2026; 4) Usulan amandemen atas peraturan dan prosedur ICC.

- Sesi Tahunan ke-61/Pertemuan Tingkat Menteri ICC



Gambar 7. Sesi Tahunan ke-61/Pertemuan Tingkat Menteri ICC di Bangkok, Thailand

Sesi Tahunan ke-61/Pertemuan Tingkat Menteri ICC dilaksanakan di Kolombo, Sri Lanka pada tanggal 18-21 November 2025. Pertemuan ini membahas berbagai isu penting terkait industri kelapa, antara lain menyampaikan update kebijakan, program riset serta tantangan dalam sektor kelapa yang dihadapi setiap negara anggota ICC. Indonesia menegaskan komitmen melalui kolaborasi, inovasi dan ketahanan bersama terhadap masa depan industri kelapa. Indonesia juga mempromosikan dan mengajak seluruh negara anggota ICC untuk menggunakan briket arang tempurung kelapa sebagai pengganti arang kayu yang tidak hanya memberikan nilai tambah pada rantai kelapa, namun juga berkontribusi signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim.

Selain itu, seluruh negara ICC membahas rencana program dan kegiatan ICC tahun 2026 yang diusulkan oleh Direktur Jenderal ICC termasuk isu-isu spesifik dan rencana program internasional seperti rencana Konferensi dan Pameran Internasional COCOTECH ICC ke-52 yang akan diselenggarakan pada Agustus 2026 di Manila, Filipina. Ke depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Coconut Day 2026, sementara ICC ke-61 akan diadakan di India pada tahun yang sama.

Hasil Pertemuan International Pepper Community (IPC)

Keanggotaan Indonesia di IPC didasarkan kepada Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1971 tentang Mengesahkan “*Agreement Establishing Pepper Community*” sebagai Hasil Inter Governmental Consultations of Regional Cooperation in Pepper in Asia”. Tidak hanya sebagai anggota penuh, Indonesia juga memiliki kedudukan penting pada IPC sebagai salah satu pendiri.

Sebagai salah satu pendiri IPC, Indonesia melakukan berbagai inisiatif strategis di IPC, antara lain sebagai penggagas peninjauan kembali *Agreement Establishing the International Pepper Community* untuk melihat korelasinya dengan kondisi terkini; sebagai inisiator pengaktifan kembali IPC *Interlaboratory Proficiency Testing Programme* yang bertujuan memberi pelatihan untuk peningkatan mutu; mendukung penyediaan data statistik yang lebih akurat oleh Sekretariat IPC; serta merevisi IPC Method of Sampling for Chemical Analysis yang telah diselaraskan dengan CODEX dan ASTA.

Kementerian Perdagangan selaku instansi penjuror berpartisipasi aktif pada kegiatan yang diselenggarakan oleh IPC diantaranya:

- Pertemuan ke-14 Komite Research & Development (R&D), 15 Juli 2025



Gambar 8. Pertemuan ke-14 Komite Research & Development (R&D) IPC di Kandy, Sri Lanka

Pertemuan ke-14 Komite R&D IPC dilaksanakan di Jakarta, Indonesia pada 15 Juli 2025 di Kandy, Sri Lanka. Diselenggarakan secara *hybrid* dari Sri Lanka, pertemuan ini membahas:

- a. Persetujuan dibentuknya Working Group MRLs yang akan dipimpin oleh Chairperson dan terdiri dari ahli di bidang MRL dari setiap negara anggota dengan tujuan untuk menetapkan standar MRLs yang akan diajukan ke CODEX.
- b. Penyampaian perkembangan IPC Super Apps.
- c. Pertemuan menyepakati timeline untuk Jurnal Focus on Pepper volume XVI Nomor 2 Edisi Juli – Desember akan dipublikasikan pada

Desember 2025 dengan call for submission akan dibuka pada Agustus 2025.

- d. Laporan perkembangan penelitian dan pengembangan lada dari setiap negara anggota.
- Pertemuan ke-11 Komite Pemasaran, 9-10 September 2025



Gambar 9. Pertemuan ke-11 Komite Pemasaran IPC di Belitung, Indonesia

Pertemuan ke-11 Komite Pemasaran IPC diselenggarakan di Belitung pada 9-10 September 2025. Berlangsung secara hybrid, pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan, Indonesia, dan membahas:

- a. Tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya, seperti melaporkan perkembangan isu pemasaran antara lain perkembangan produksi dan statistik perdagangan lada, program pemasaran dan promosi untuk mendorong peningkatan konsumsi dan ekspor, hambatan ekspor lada.
- b. Laporan penurunan produktivitas lada di semua negara anggota serta penolakan pengiriman akibat residu pestisida di negara konsumen.
- c. Pengembangan aplikasi IPC Super App untuk mendukung petani dan transparansi harga.
- d. Usulan relokasi kantor IPC ke Ho Chi Minh City yang kembali diajukan Vietnam, tetapi ditolak oleh sebagian besar anggota.

- Pertemuan ke-31 Komite Mutu



Gambar 10. Pertemuan ke-11 Komite Mutu IPC di Kuching, Malaysia

Pertemuan ke-31 Komite Mutu IPC diselenggarakan pada 1-2 Oktober 2025 di Kuching, Malaysia. Pertemuan membahas yaitu:

- a. Progress dan tindak lanjut pertemuan Komite Mutu ke-30.
- b. Laporan negara anggota IPC terkait pembahasan regulasi dan program peningkatan mutu lada serta perkembangan database MRLs.
- c. Perkembangan draf standar light berries dan program uji profisiensi.
- d. Pembahasan rencana kerja Komite Mutu IPC 2025/2026.

- Rangkaian Pertemuan Eksekutif Heads of Delegations (HoD) ke-53, 28-29 Oktober 2025



Gambar 11. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Menghadiri Pertemuan Eksekutif Heads of Delegations (HoD) ke-53 di Kochi, India

Pertemuan ini membahas sejumlah agenda penting, antara lain:

- a. Sekretariat IPC mengusulkan penggabungan 5 (lima) aplikasi Farmers Apps ke dalam 1 (satu) aplikasi Super Apps. disepakati nama IPC Supper Apps berubah menjadi IPCPepperLink.
- b. Anggaran IPC tahun 2026 diusulkan sebesar US\$341.500, mengalami penurunan sebesar 0,29% dibandingkan anggaran tahun 2025 sebesar US\$342.500. Seluruh negara anggota mengharapkan agar anggaran IPC 2025 dialokasikan terutama pada program dan kegiatan.
- c. DE IPC menyampaikan progress rencana kerja IPC periode 2024-2026, yang secara garis besar mencakup aspek peran dan fungsi IPC, perluasan keanggotaan, peningkatan transparansi pasar lada, pengembangan dan penyaluran informasi terkait perekonomian lada global, serta administrasi IPC.

4. Kerja Sama Organisasi Komoditas Karet, Kopi dan Komoditas Lainnya

Hasil Pertemuan International Tripartite Rubber Council (ITRC)

Rangkaian Pertemuan International Tripartite Rubber Council (ITRC) ke-40 telah diselenggarakan tanggal 18 – 20 Agustus 2025 di Yogyakarta, Indonesia. Dalam rangkaian ini, dilakukan Pertemuan Komite Statistik ke-37; Pertemuan Komite Sustainable Natural Rubber (SNR) ke-6; dan ditutup dengan Pertemuan ITRC ke-40. Seluruh negara anggota ITRC (Thailand, Indonesia dan Malaysia/TIM) hadir secara fisik pada rangkaian pertemuan tersebut.

Pertemuan mencatat laporan Sekretariat ITRC bahwa pada kuartal I tahun 2025, harga rata-rata tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Meskipun masih menunjukkan volatilitas, tingkat kestabilannya secara komparatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang paruh pertama tahun 2025, RRMP mencapai titik tertinggi sebesar 221,72 sen Dollar AS/kg pada 24 Februari 2025 dan titik terendah sebesar 174,02 sen Dollar AS/kg pada 9 April 2025.

Sekretariat ITRC menyampaikan laporan pelaksanaan Pertemuan Khusus Pejabat Senior ITRC pada 11 – 12 Maret 2025 serta Pertemuan ke-83 dan ke-84 Board of Director (BoD) IRCo pada 27 Maret 2025 dan 21 Juli 2025.

Pertemuan menyepakati rekomendasi pertemuan ke-37 ITRC, diantaranya: 1) penerapan Sustainable Approach untuk pemantauan SMS periode 2026–2030 dengan target pangsa pasar ITRC 60 persen pada 2030, 2) menugaskan sekretariat menghitung ulang kuota per negara anggota; 3) menegaskan perlunya peninjauan kerangka SMS agar tetap relevan dengan dinamika pasar dan tuntutan keberlanjutan.

Pertemuan juga menyepakati rekomendasi Pertemuan ke-6 Komite Sustainable Natural Rubber (SNR) yang mencatat perkembangan kebijakan pasar karbon, isu EUDR, dan perlunya pedoman bersama berbasis regulasi nasional, yang akan difinalisasi melalui workshop di Thailand.

Indonesia melaporkan dukungan pendanaan sekitar Rp. 516 juta untuk program ketertelusuran petani kecil, penyediaan peralatan dan mesin pengolahan karet, serta penguatan kapasitas petani.

Pertemuan mencatat laporan negara anggota dalam kerangka IMT-GT, khususnya di sektor karet dan pengembangan kawasan industri berbasis komoditas. Indonesia memaparkan kemajuan pengembangan Sei Mangkei Rubber City sebagai proyek unggulan hilirisasi serta rencana penyelenggaraan workshop bertema “Enhancing Natural Rubber Utilization through Diversification of Rubber Products” yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada kuartal IV tahun 2025.

Sekretariat menyampaikan perkembangan restrukturisasi IRCo untuk empat posisi utama, yaitu Chief Executive Officer (CEO), Asistant Secretary (AS), Market

Analyst (MA), serta Administrative and Finance Officer (AF). Indonesia telah menyampaikan kandidat, yaitu Ibu Trisna Ulfatmi (Kementerian Perdagangan). Pertemuan sepakat agar Thailand dan Indonesia menyampaikan usulan kandidat MA, yang kemudian akan diputuskan oleh BoD IRCo. Untuk posisi AF, Pertemuan sepakat atas usulan Thailand untuk tidak mensyaratkan sertifikasi Continuing Profession Development (CPD).

Chairman ITRC menekankan perlunya percepatan perekrutan seluruh posisi di IRCo, yaitu CEO, AF, dan MA. Proses seleksi kiranya dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kompetensi.

Sekretariat melaporkan bahwa berdasarkan keputusan RUPS IRCo ke-21 pada 28 April 2025 di Bangkok, disepakati penambahan modal sebesar THB 22,89 juta dengan kontribusi proporsional dari tiap negara anggota (THB 10,17 juta dari Thailand, THB 7,63 juta dari Indonesia, dan THB 5,08 juta dari Malaysia) untuk menopang operasional IRCo selama dua hingga tiga tahun ke depan.

Indonesia menegaskan kesiapan untuk menyetorkan tambahan modal pada tahun berjalan setelah adanya keputusan tingkat Menteri. Jika penyetoran tidak dapat dilakukan pada tahun ini, maka pengajuan akan dialihkan untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Malaysia mengonfirmasi kesiapan penyetoran tambahan modal pada tahun ini melalui mekanisme cicilan tahunan (annual installment).

Negara anggota sepakat agar proses keputusan tingkat Menteri dilakukan melalui Resolution by Circulation. Setelah adanya pengesahan di tingkat Menteri, masing-masing negara diminta segera menindaklanjuti prosedur internal agar target penyetoran tambahan modal dapat direalisasikan pada tahun 2025.

Sekretariat memaparkan lima program strategis ITRC/IRCo, yakni: (i) peningkatan pangsa pasar; (ii) penguatan peran dan restrukturisasi IRCo; (iii) pengembangan karet alam berkelanjutan; (iv) inklusi perkebunan karet dalam skema kredit karbon; dan (v) tinjauan pasar serta prospek industri karet.

Pertemuan mencatat bahwa seluruh program strategis dapat dijalankan dengan prioritas dan implementasi yang disesuaikan dengan kapasitas pendanaan IRCo agar organisasi tetap berfungsi efektif.

Pertemuan menyetujui bahwa keputusan tingkat Menteri terkait penambahan modal IRCo akan dilakukan melalui mekanisme Resolution by Circulation.

Berdasarkan mekanisme rotasi, Malaysia akan menjadi tuan rumah Rangkaian Pertemuan ke-41 ITRC. Adapun rincian waktu dan lokasi penyelenggaraan akan diinformasikan kemudian oleh Malaysia.



Gambar 12. Foto bersama *Chairman* ITRC, CEO IRCo, dan para HoD dari Thailand, Indonesia, dan Malaysia.



Gambar 13. Dirjen Perdagangan Internasional sebagai *Chairman* pada Pertemuan ITRC ke-40 di Yogyakarta, Indonesia.



Gambar 14. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional sebagai Head of Delegates (HoD) dan Sesditjen PPI sebagai Alternate HoD beserta delegasi Indonesia pada Pertemuan ITRC ke-40.

Hasil Pertemuan Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)

Rangkaian Pertemuan ANRPC Tahun 2025 telah diselenggarakan pada tanggal 6 - 8 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Rangkaian pertemuan ini terdiri dari Pertemuan ke-8 Komite Urusan Industri (IMC), Pertemuan ke-57 Komite Eksekutif ANRPC (*Executive Committee/EXCO*), dan Pertemuan ke-47 ANRPC Assembly. Negara anggota juga turut menghadiri International Rubber Economic Conference (IREC) yang diselenggarakan oleh Malaysian Rubber Board (MRB) tanggal 9 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pertemuan mencatat hasil kelompok kerja yang membahas metode pengumpulan data, penanganan kekurangan data, serta pentingnya data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perumusan kebijakan. Kolaborasi antar negara anggota sangat penting untuk mengatasi kesenjangan data, serta ditekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap data produksi dan konsumsi guna menjaga keakuratan informasi.

ANRPC Secretariat (ANSEC) menyampaikan perkembangan publikasi Monthly NR Statistical Report, Handbook on NR Statistics, Annual Bulletin of Rubber Statistics, dan Bi-weekly Market Intelligence Report untuk mendukung diseminasi dan analisis data sektor karet alam. ANSEC mencatat usulan Indonesia untuk penerbitan Market Intelligence Report pada kuartal pertama 2026. Pertemuan juga menekankan pentingnya penyampaian data secara tepat waktu dari negara anggota (batas waktu tanggal 25 setiap bulan).

Pertemuan mencatat penyampaian ANSEC terkait concept note promosi Green Credentials Natural Rubber melalui kerja sama dengan International Rubber Research Development Board (IRRDB) untuk penyelenggaraan side event pada COP30 di Brasil, yang telah dikonfirmasi oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Menanggapi hal tersebut, pertemuan

merekomendasikan agar ANSEC menyampaikan ringkasan lengkap rencana kegiatan tersebut, termasuk tujuan dan bentuk aktivitas.

Pertemuan mencatat masukan dari Indonesia, Sri Lanka, dan Kamboja terkait penyempurnaan definisi conversion, cut-off date, natural forest, dan smallholders dalam penyusunan Sustainable Natural Rubber (SNR) Guidelines. Masukan tersebut telah dikompilasi oleh ANSEC dan akan menjadi bahan pembahasan pada pertemuan Working Group on Sustainable Natural Rubber (WGSNR) berikutnya. Pertemuan juga merekomendasikan agar meskipun penyusunan awal melibatkan pihak ketiga, pembahasan selanjutnya dan keputusan, sepenuhnya menjadi kewenangan negara anggota. Pertemuan WGSNR dijadwalkan berlangsung pada April 2026 secara fisik di India.

Pertemuan mencatat rencana pelaksanaan 4th International Workshop on Rubber Market Analysis and Research pada kuartal pertama 2026 dengan Thailand sebagai tuan rumah. Workshop ini akan berfokus pada teknologi seperti Artificial Intelligence untuk membantu analisis pergerakan harga karet alam secara lebih efektif.

Pertemuan mencatat hasil studi kelayakan implementasi LRP, yang menunjukkan bahwa LRP tidak layak diterapkan saat ini. Dalam diskusi, negara anggota menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap petani kecil melalui mekanisme yang relevan di masing-masing negara. Sejumlah negara, termasuk Malaysia, India, Tiongkok, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini, menekankan perlunya kerangka kerja atau mekanisme baru yang lebih realistis dan adaptif terhadap kondisi nasional, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen. Pertemuan menyepakati agar diskusi mengenai mekanisme LRP ini tetap terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai upaya menjaga keberlanjutan sektor karet alam, dan meminta ANSEC menyiapkan proposal tindak lanjut.

Pertemuan mencatat informasi ANSEC mengenai upaya perluasan keanggotaan ANRPC. ANSEC melaporkan telah menerima surat dari Pantai Gading pada Juli 2025 yang menyatakan bahwa negara tersebut sedang memproses keanggotaan melalui koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Luar Negeri. Pertemuan sepakat mendorong ANSEC untuk menjajaki Brasil dan Guatemala sebagai calon anggota baru, termasuk menyusun rencana strategis, penunjukan focal point, serta lini waktu perluasan keanggotaan.

Pertemuan mencatat penyampaian ANSEC mengenai perkembangan administrasi dan manajemen ANSEC 2025, termasuk kegiatan publikasi, speaker engagement, serta seminar dan kegiatan outreach. Indonesia dan Thailand meminta ANSEC untuk mengedarkan dokumen pertemuan minimal dua minggu sebelum pelaksanaan serta kelengkapan informasi pada dokumen pertemuan, untuk memberikan waktu yang cukup bagi negara anggota melakukan konsultasi domestik dan menyiapkan posisi nasional. Selain itu, pertemuan menekankan pentingnya kejelasan working paper pada pertemuan berikutnya, terutama terkait isu, ekspektasi pembahasan, dan rekomendasi yang diharapkan dari negara anggota. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar ANSEC menyediakan

ringkasan dan evaluasi kegiatan ANRPC guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan negara anggota.

Pertemuan mencatat tiga negara yang belum menyelesaikan kontribusi tahun 2025, yaitu Myanmar, Singapura, dan Indonesia, dengan tunggakan kontribusi Indonesia sebesar RM224.739. Pertemuan juga mencatat bahwa Filipina belum membayar kontribusi tahun 2023 – 2025.

Pertemuan menyepakati untuk melanjutkan langganan Trade Data Monitor (TDM) dan menunda pembuatan ANRPC Database dan Dashboard, sehingga anggaran ANRPC tahun 2026 ditetapkan sebesar RM1.352.700, atau turun 4,61% dibandingkan tahun 2025. Indonesia telah menyampaikan keberatan terhadap pembayaran langganan TDM, mengingat rekomendasi Pertemuan ke-5 ad-hoc Working Group on Administrative Matters untuk menghentikan langganan TDM dan mengeluarkan anggaran pembuatan ANRPC Database dan Dashboard. Lebih lanjut, Indonesia meminta perbandingan data TDM dan sumber data lainnya, untuk memastikan transparansi, keakuratan, dan manfaatnya bagi negara anggota.

Berdasarkan besaran produksi Indonesia, kontribusi Indonesia pada ANRPC tahun 2026 menjadi RM187.052 atau turun sebesar 16,77% dibandingkan kontribusi Indonesia tahun 2025.

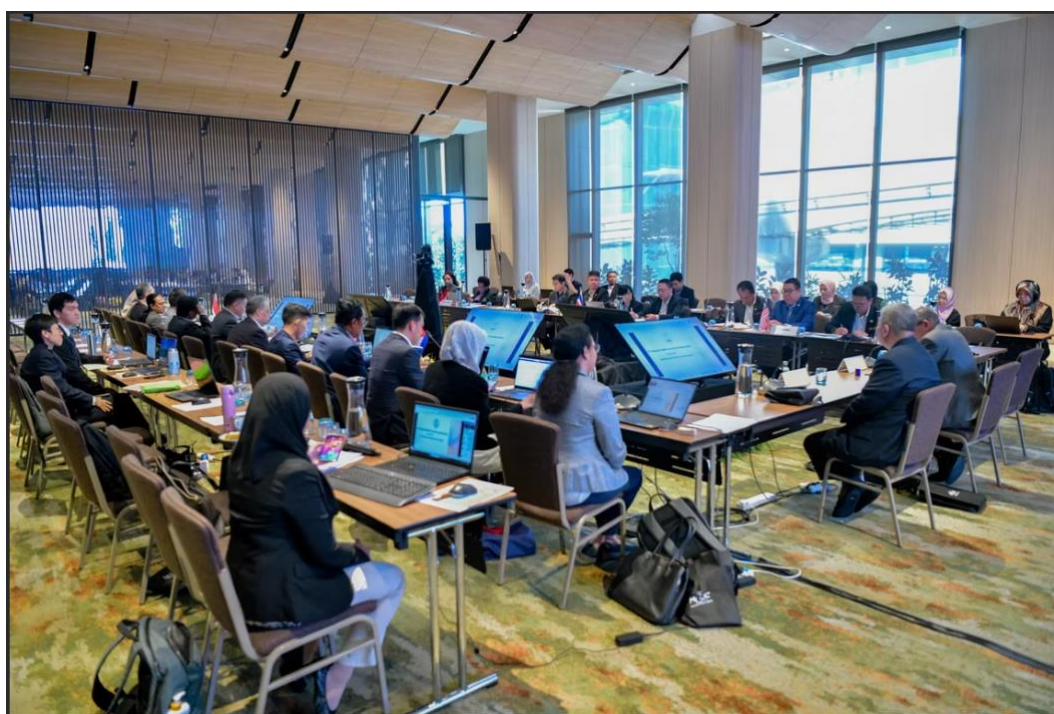
Pertemuan mencatat bahwa Papua Nugini menunda giliran negaranya untuk menominasikan Sekretaris Jenderal hingga periode berikutnya. Sesuai mekanisme rotasi, Thailand mengambil giliran untuk periode 2026 – 2028 dan mengusulkan Mr. Suttipong Angthong sebagai kandidat. Pertemuan menyepakati usulan tersebut. Adapun masa jabatan Sekretaris Jenderal ANRPC sebelumnya, Mr. Toh Heng Guan dari Singapura, akan berakhir pada 31 Desember 2025.

Pertemuan menyepakati Thailand sebagai tuan rumah Rangkaian Pertemuan Tahunan ANRPC tahun 2026 dan Tiongkok tahun 2028. Untuk tahun 2027, pertemuan menominasikan Papua Nugini dan Indonesia, dan kedua negara tersebut diminta memberikan konfirmasi kesediaan dalam waktu enam bulan ke depan.

IREC 2025 telah diselenggarakan pada 9 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan ANRPC. IREC 2025 mengusung tema "Sustainable Natural Rubber Initiatives: Shaping the Future Together". Konferensi ini menghadirkan perwakilan pemerintah, pelaku industri, peneliti, serta organisasi internasional untuk membahas dinamika pasar karet alam global, termasuk tren harga, proyeksi permintaan dan pasokan, kebijakan keberlanjutan, serta tantangan dan peluang sektor karet di tengah transisi ekonomi hijau. Dalam konferensi ini juga disoroti pentingnya inovasi teknologi, diversifikasi produk, serta penguatan kerja sama lintas negara produsen untuk memperkuat posisi karet alam dalam rantai pasok global.



Gambar 15. Para Delegasi ANRPC pada Rangkaian Pertemuan ANRPC Tahun 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.



Gambar 16. Suasana Rangkaian Pertemuan ANRPC Tahun 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hasil Pertemuan International Coffee Organization (ICO)

Pada tanggal 27 Maret 2025 telah diselenggarakan Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-139 secara virtual yang dipimpin oleh Mr Tom Fabozzi dari Uni Eropa – Irlandia, selaku Ketua Dewan ICO periode tahun kopi 2024/25.

Penentuan hak suara negara anggota ICO tahun 2024/25 didasarkan pada perhitungan statistik rata-rata volume ekspor atau rata-rata volume impor selama 4 tahun sebelumnya, yaitu sejak tahun 2020 hingga 2023. Mengacu kepada perhitungan tersebut, Indonesia memiliki 64 hak suara pada tahun kopi 2024/25 dan menjadikan Indonesia sebagai pemegang hak suara terbesar keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia.

Direktur Eksekutif (DE) ICO menginformasikan perkembangan terkini keanggotaan ICA 2022. Terdapat dua negara tambahan yang telah menandatangani ICA 2022, yaitu Kuba (12 September 2024) dan Pantai Gading (21 November 2024), serta dua negara tambahan yang telah menyimpan instrumen ICA 2022, yaitu El Salvador (instrumen ratifikasi pada 4 Maret 2025) dan Togo (instrumen penerimaan pada 18 Maret 2025). Hingga saat ini, terdapat 20 negara yang telah menandatangani ICA 2022, tujuh negara di antaranya telah menyimpan instrumen ICA 2022 dan menyelesaikan prosedur keanggotaannya atas ICA 2022. Ketujuh negara tersebut terdiri dari El Salvador, Jepang, Meksiko, Nikaragua, Swiss, Arab Saudi, dan Togo. DE ICO turut menginformasikan mengenai rencana penandatanganan ICA 2022 oleh Honduras dan Vietnam, yang masing-masing akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2025 dan 9 April 2025.

Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-139 menyepakati perpanjangan tenggat waktu penandatanganan dan ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan ICA 2022. Tenggat waktu penandatanganan ICA 2022 diperpanjang hingga tanggal 30 April 2027, sedangkan tenggat waktu penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan ICA 2022 diperpanjang hingga tanggal 31 Juli 2027. Pertemuan juga menyepakati perpanjangan jangka waktu ICA 2007 selama 2 tahun, yaitu sejak tanggal 2 Februari 2026 hingga 1 Februari 2028.

Pada agenda situasi keuangan organisasi dan perkembangan tunggakan pembayaran negara anggota, Ketua Komite Finance and Administration (FA) periode tahun kopi 2024/25, yang dijabat oleh Duta Besar Aly Touré dari Pantai Gading, menginformasikan situasi keuangan ICO. Saldo kas ICO per Januari 2025 sebesar £3.388.688, yang dinilai cukup untuk mendanai kegiatan operasional ICO hingga akhir tahun kopi 2024/25 (September 2025). Sekretariat ICO telah menerima 74 persen kontribusi negara anggota untuk tahun kopi 2024/25 atau sebesar £1.930.779. Indonesia menginformasikan tertundanya pembayaran kontribusi Indonesia tahun kopi 2024/25 sebesar £83.200 yang disebabkan transisi administratif setelah terbentuknya pemerintahan yang baru.

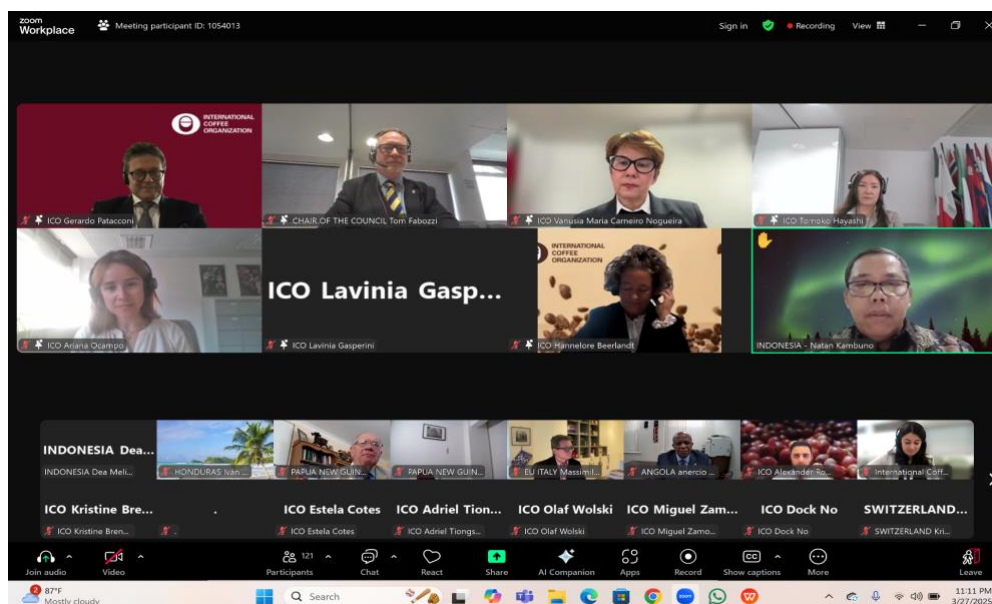
Pada agenda pelaksanaan program kegiatan, diinformasikan mengenai rencana pelaksanaan tiga lokakarya statistik regional ICO pada Kawasan Asia, Amerika Tengah, dan Afrika. Lokakarya statistik tersebut bertujuan untuk membahas metode pengumpulan, interpretasi, dan pelaporan data guna meningkatkan mutu data statistik kopi yang dilaporkan negara anggota kepada Sekretariat ICO secara

berkala. Sebagai informasi, lokakarya statistik untuk Kawasan Asia dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2025 sebagai salah satu kegiatan pada *World of Coffee 2025*.

Pada agenda Pertemuan Joint Committee, Ketua Joint Committee periode tahun kopi 2024/25, yang dijabat oleh Mr Zoltan Agai dari Uni Eropa, melaporkan hasil Pertemuan ke-2 Joint Committee tanggal 12 Maret 2025. Beberapa informasi penting pada laporan pertemuan tersebut adalah mengenai: i) tema *International Coffee Day 2025* adalah “*Collaboration within the Coffee Value Chain*”; ii) permintaan Brasil agar Sekretariat ICO melaksanakan analisis terkait konsumsi kopi di pasar Tiongkok; dan iii) Sekretariat ICO diminta untuk mensirkulasikan rincian proposal studi, survei, dan penyusunan laporan untuk tahun kopi 2024/25.

Pertemuan ICO selanjutnya terdiri dari: i) Rangkaian Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-140 yang akan dilaksanakan di San Pedro Sula, Honduras, pada tanggal 22 – 26 September 2025; ii) Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-141 yang akan dilaksanakan secara virtual, pada salah satu hari di antara tanggal 23 – 27 Maret 2026; dan iii) Rangkaian Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-144 yang akan dilaksanakan di Bogotá, Kolombia, pada tanggal 27 September – 1 Oktober 2027.

Pada agenda isu lainnya, Swiss mengajukan diri menjadi tuan rumah Rangkaian Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-142 pada bulan September 2026, yang akan berlokasi di Jenewa. Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-139 juga menyepakati penggantian posisi Wakil Ketua Joint Committee periode tahun kopi 2024/25, dari Bapak Reza Pahlevi Chairul menjadi Bapak Natan Kambuno, selaku Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional yang baru.



Gambar 17. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional mewakili Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-139 yang dilaksanakan secara virtual.

5. Kerja Sama G20, BRICS, WEF dan G7

G20 TRADE AND INVESTMENT WORKING GROUP (TIWG)

G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) merupakan forum teknis pembahasan isu perdagangan dan investasi dalam kerangka G20. Pada tahun 2025, pembahasan TIWG berada di bawah Presidensi Afrika Selatan dengan fokus antara lain pada penguatan dimensi pembangunan, ketahanan rantai pasok, serta dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral.

Kementerian Perdagangan sebagai *focal point* Indonesia mengikuti seluruh rangkaian pertemuan TIWG dan terlibat dalam proses pembahasan serta perumusan draft dokumen hasil. Dalam perundingan, Indonesia menyampaikan posisi nasional pada sejumlah isu prioritas, termasuk pentingnya reformasi WTO yang inklusif, dukungan terhadap UMKM, serta perlunya menjaga ruang kebijakan bagi negara berkembang anggota G20 dalam melaksanakan kebijakan industri.

Pembahasan berlangsung dinamis mengingat adanya perbedaan kepentingan antar anggota, khususnya pada isu *industrial policy* dan perdagangan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Indonesia berupaya menjaga konsistensi posisi nasional sekaligus mendorong tercapainya rumusan yang dapat diterima seluruh anggota.



Gambar 18. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Memimpin Delegasi RI pada Pertemuan *G20 Trade and Investment Working Group (TIWG)* Afrika Selatan tahun 2025

G20 TRADE AND INVESTMENT MINISTERIAL MEETING (TIMM)

Pertemuan *Trade and Investment Ministerial Meeting* (TIMM) merupakan forum tingkat menteri yang mengkonsolidasikan hasil pembahasan TIWG. TIMM tahun 2025 menjadi momentum untuk menyepakati dokumen hasil di tengah situasi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian.

Indonesia berpartisipasi dalam pembahasan dan finalisasi dokumen hasil TIMM serta menyampaikan pandangan nasional terkait arah kerja sama perdagangan ke depan. Para Menteri Perdagangan dan Investasi G20 sepakat untuk mengadopsi dokumen keluaran utama yaitu *Trade and Investment Ministerial Statement*.

Indonesia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem perdagangan global serta memastikan agar agenda perdagangan tetap mendukung pembangunan dan transformasi ekonomi negara berkembang. Partisipasi Indonesia dalam TIMM dilakukan melalui koordinasi internal lintas kementerian/lembaga guna memastikan keselarasan posisi dan kepentingan nasional dalam forum tersebut.



Gambar 19. Menteri Perdagangan RI Didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Menghadiri *G20 Trade and Investment Ministerial Meeting* (TIMM) Afrika Selatan tahun 2025

BRICS CONTACT GROUP ON ECONOMIC AND TRADE ISSUES (CGETI)

Contact Group on Economic and Trade Issues (CGETI) merupakan forum teknis BRICS yang membahas kerja sama ekonomi dan perdagangan antar anggota. Pada tahun 2025, pembahasan CGETI berada di bawah Presidensi Brasil, mencakup sejumlah isu terkait peningkatan kerja sama perdagangan, fasilitasi perdagangan, dan peluang kolaborasi industri.

Indonesia berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan CGETI dan mengikuti proses pembahasan serta penyusunan dokumen hasil. Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan pandangan terkait pentingnya kerja sama yang bersifat saling menguntungkan dan tetap selaras dengan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral.

Selain itu, forum CGETI juga dimanfaatkan untuk melakukan peninjauan komunikasi dengan beberapa anggota BRICS guna mengidentifikasi peluang kerja sama lanjutan yang relevan dengan kepentingan nasional.

BRICS TRADE MINISTERS MEETING (TMM)

Trade Ministers' Meeting (TMM) BRICS tahun 2025 merupakan forum tingkat menteri yang mengkonsolidasikan hasil pembahasan *Contact Group on Economic and Trade Issues (CGETI)* serta memberikan arahan strategis terhadap kerja sama perdagangan antar anggota. dengan dokumen keluaran utama berupa *Joint Communiqué*.

Pertemuan tingkat menteri ini berlangsung dalam konteks untuk meningkatkan peran BRICS sebagai platform koordinasi ekonomi negara-negara berkembang di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global.

Pada tingkat menteri, pembahasan difokuskan pada penguatan kerja sama perdagangan intra-BRICS, peningkatan fasilitasi perdagangan, serta peninjauan peluang kolaborasi di sektor-sektor prioritas. Indonesia dalam penyampaiannya menekankan pentingnya agar kerja sama yang dibangun bersifat konkret, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masing-masing anggota. Selain itu, Indonesia juga berpandangan bahwa penguatan kerja sama BRICS perlu tetap selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berbasis aturan.

Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia berharap bahwa forum ini dapat menjadi *platform* strategis untuk meningkatkan kerja sama dan solidaritas negara-negara *Global South* serta mendorong tatanan perdagangan global yang lebih berimbang dan berkeadilan.

Keikutsertaan Indonesia dalam TMM BRICS 2025 tidak hanya menjaga kesinambungan keterlibatan dalam forum tersebut, tetapi juga membuka ruang dialog lanjutan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kerja sama yang lebih spesifik dan terarah pada periode berikutnya.



Gambar 20. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, mewakili Menteri Perdagangan RI, hadir dalam Pertemuan 15th BRICS Trade Ministers Meeting (TMM) Brasil tahun 2025

6. Kegiatan Kerja Sama di Forum D8, OKI, dan IORA

D-8

The 8th Session of the Supervisory Committee (SC) of the D-8 Preferential Trade Agreement, Tanggal 16-17 Juni 2025 di Abuja, Nigeria

Pertemuan membahas perkembangan implementasi serta rencana perluasan *D-8 Preferential Trade Agreement (PTA)* menuju kerja sama yang lebih komprehensif, termasuk perluasan cakupan daftar konsesi produk maupun penajakan pembentukan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. Secara umum, Negara Anggota D-8 mendukung agenda perluasan tersebut. Namun demikian, sebagian negara berpandangan bahwa perlu menunggu hingga seluruh anggota menyelesaikan proses domestik dan implementasi perjanjian yang telah disepakati.

Sejak Pertemuan SC ke-7 pada Maret 2024, terdapat sejumlah perkembangan, antara lain: Pakistan telah mengimplementasikan PTA pada 1 Januari 2025; Protokol *Dispute Settlement Mechanism (DSM)* telah ditandatangani oleh Indonesia, Mesir, Nigeria, dan Turki; Mesir menargetkan implementasi PTA pada awal tahun 2026; serta Azerbaijan telah resmi bergabung dalam D-8 PTA. Dengan perkembangan tersebut,

saat ini enam negara telah mengimplementasikan D-8 PTA, sementara Nigeria dan Mesir masih dalam tahap finalisasi proses domestik.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan pertukaran data pemanfaatan PTA antarnegara anggota serta penggunaan pendekatan *request-offer* dalam rangka perluasan daftar konsesi.

1st Experts Working Group (EWG) D-8 PTA, Tanggal 12 November 2025 (Virtual)

Pertemuan membahas dan menyepakati *Terms of Reference* (TOR) pembentukan *Expert Working Group* (EWG) guna mengkaji perluasan D-8 PTA menuju instrumen yang lebih progresif. Struktur EWG disepakati dengan Mesir sebagai Chair, Indonesia dan Bangladesh sebagai Vice Chair, serta Turki sebagai Rapporteur yang didukung oleh Sekretariat D-8.

Tiga opsi perluasan yang akan dikaji meliputi: (i) perluasan daftar komitmen melalui pendekatan *request-list*; (ii) peningkatan PTA menjadi FTA; atau (iii) pengembangan PTA menuju CEPA. Sejumlah negara, termasuk Iran, Nigeria, dan Mesir, menekankan perlunya analisis yang komprehensif. Turki dan Indonesia mendorong agar EWG menyusun kajian dan rekomendasi untuk diputuskan pada tingkat SC dan TMC. Bangladesh menyoroti aspek keadilan dalam pemanfaatan perjanjian, sementara Pakistan dan Malaysia berpandangan bahwa implementasi penuh PTA perlu diprioritaskan sebelum dilakukan perluasan.

Pertemuan EWG akan dilakukan setiap dua bulan dengan penyampaian laporan berkala; serta penambahan ketentuan mengenai penyusunan laporan akhir *scoping paper* yang memuat rekomendasi ruang lingkup, struktur, dan peta jalan perundingan untuk disampaikan kepada SC dan diadopsi hingga tingkat KTT.

The 4th Trade Ministers Council (TMC) of the D-8, Tanggal 1-2 Desember 2025 di Kairo, Mesir

Pertemuan *Trade Ministers Council* (TMC) ke-4 membahas penguatan kerja sama perdagangan, khususnya melalui perluasan D-8 PTA menuju kerja sama yang lebih komprehensif. TMC mengesahkan laporan Pertemuan Pertama EWG yang dilaksanakan pada 12 November 2025 serta laporan Pertemuan ke-8 *Supervisory Committee* (SC) yang diselenggarakan pada 16 Juni 2025 di Abuja, Nigeria.

Indonesia secara khusus mendorong agar seluruh negara anggota D-8 segera menyelesaikan proses ratifikasi PTA guna memastikan implementasi penuh perjanjian tersebut. Terkait opsi perluasan menuju CEPA, Indonesia mengusulkan agar proses perundingan dilakukan melalui pendekatan bertahap (*incremental approach*) atau *single undertaking*. Selain itu, Indonesia mengusulkan agar kerja sama di bidang halal turut dimasukkan dalam cakupan perluasan menuju D-8 CEPA.

Pertemuan TMC mengadopsi *Cairo Declaration on D-8 Organization's Trade Cooperation*. Pada kesempatan tersebut, Mesir dan Pakistan menandatangani Protokol *Dispute Settlement Mechanism* (DSM). Indonesia juga menyampaikan kesiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan TMC ke-5.

OKI

Trade Working Group (TWG) ke-24, Tanggal 21 April 2025 (Virtual)

Pertemuan mengusung tema “Developing/Improving Export Strategies in the OIC Member Countries” dan dihadiri oleh perwakilan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pertemuan menekankan pentingnya pengembangan National Export Strategy (NES) yang terintegrasi dan adaptif guna meningkatkan daya saing serta diversifikasi ekspor negara anggota OKI.

Pertemuan membahas *draft policy guide* pengembangan strategi ekspor dengan pendekatan multidimensi, disesuaikan dengan kondisi ekonomi, geografis, dan sektor unggulan masing-masing negara. NES dipandang sebagai instrumen strategis untuk merespons tantangan perdagangan global, meningkatkan kinerja ekspor, dan mendukung pembangunan sosio-ekonomi.

Trade Working Group (TWG) ke-25, Tanggal 22-23 September 2025 di Ankara, Turki

Pertemuan masih mengusung tema “Developing/Improving Export Strategies in the OIC Member Countries”. Pertemuan dihadiri oleh 23 (dua puluh tiga) perwakilan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan sejumlah organisasi internasional. Dalam hal ini, Delegasi Indonesia diwakili oleh Atase Perdagangan Ankara karena Kementerian Perdagangan berhalangan hadir secara fisik.

Pertemuan membahas perkembangan perdagangan negara anggota OKI dan penguatan strategi ekspor. CCO memaparkan *Trade Outlook of the OIC Member Countries* mengenai dinamika perdagangan global dan intra-OKI, dilanjutkan pemaparan *Draft Research Report* UTRLab yang memuat proses penyusunan strategi ekspor, *best practices*, serta rekomendasi kebijakan, termasuk peran penting digitalisasi.

Sesi studi kasus menyoroti pengalaman Nigeria, Azerbaijan, Indonesia, Mesir, serta RRT dan Belanda, dengan indikator seperti diversifikasi dan kapasitas ekspor, kelembagaan, digitalisasi perdagangan, dan kerangka regulasi. Sesi berbagi pengalaman bersama Bangladesh, Malaysia, Turki, dan WTO juga menekankan pentingnya koordinasi kebijakan dan dukungan institusional.

Pertemuan TNC TPS-OIC, Tanggal 1-2 Oktober 2025 di Ankara, Turki

Pertemuan membahas perkembangan *Trade Preferential System of the OIC* (TPS-OIC) serta rencana perluasan kerja sama sebagai tindak lanjut hasil *The 3rd Ministerial Meeting of the TPS-OIC Trade Negotiating Committee* (TNC). Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, dan Iran menyatakan dukungan terhadap rencana perluasan. Sementara itu, negara-negara GCC berpandangan bahwa implementasi TPS-OIC perlu dioptimalkan terlebih dahulu sebelum memulai perundingan perluasan.

Indonesia mengusulkan agar terlebih dahulu disepakati pendekatan perundingan yang akan ditempuh, yaitu secara komprehensif atau bertahap (*incremental*). Sebagai tahap awal, perluasan dapat difokuskan pada aspek *Trade in Goods*, atau sekaligus mencakup *Trade in Services* dan *Investment*, sebelum diperluas ke sektor kerja sama lainnya.

TNC memutuskan bahwa pertemuan selanjutnya akan membahas sejumlah isu utama, antara lain kendala implementasi PRETAS, kemungkinan perluasan cakupan kerja sama, tujuan perluasan, pertimbangan aspek hukum, serta isu kelembagaan.

IORA

Pertemuan dengan Sekretariat IORA dalam rangka Membahas Perkembangan IORA Web Trade Repository, Tanggal 25 November 2025 (Virtual)

Pertemuan virtual dengan Michael Gurner, Director of Trade and Investment Facilitation (TIF) Sekretariat IORA, yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, membahas perkembangan *IORA Web Trade Repository* (IORA-TR). Pertemuan ini dilaksanakan atas permintaan Sekretariat IORA untuk memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas inisiatif Indonesia.

Indonesia menegaskan komitmen untuk melanjutkan pengembangan IORA-TR, meskipun saat ini masih berlangsung koordinasi internal terkait berbagai dukungan sumber daya. Sekretariat IORA menyampaikan harapan agar IORA-TR dapat segera diluncurkan (*go live*) serta menyatakan kesiapan untuk mendukung komunikasi dan koordinasi dengan negara anggota guna menentukan arah tindak lanjut maupun langkah teknis yang diperlukan. Selain itu, Sekretariat mendorong penyelesaian pembaruan pedoman teknis sebelum dilakukan konsultasi melalui *Working Group on Trade and Investment* (WGTI).

Dalam konteks transisi keketuaan WGTI dari Sri Lanka kepada India yang akan dimulai pada November 2025, isu IORA-TR menjadi salah satu prioritas yang akan terus dikawal. Inisiatif ini merupakan *legacy*

Indonesia pada masa Keketuaan IORA tahun 2017 dan memperoleh perhatian khusus dari India selaku Chair IORA. Pertemuan lanjutan direncanakan pada awal tahun 2026, setelah struktur kepemimpinan WGTI ditetapkan, untuk membahas perkembangan dan langkah tindak lanjut.

Pertemuan Indian Ocean Rim Association (IORA) Annual Trade Dialogue, Tanggal 1-2 Desember 2025 (Hybrid)

Pertemuan *IORA Annual Trade Dialogue* diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Mozambik selaku *Chair Working Group on Trade and Investment* (WGTI) bekerja sama dengan *Indian Ocean Rim Business Forum* (IORBF). Dialog bertujuan membahas dinamika perdagangan global serta memperkuat koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam perumusan kebijakan perdagangan.

Pembahasan mencakup penguatan ketahanan rantai pasok melalui mitigasi risiko, respons terhadap fragmentasi ekonomi, dan peningkatan otonomi strategis, serta pentingnya fasilitasi investasi melalui optimalisasi *single window* dan penyesuaian regulasi guna mendukung pencapaian SDGs. Selain itu, dibahas integrasi kebijakan perdagangan dan lingkungan untuk mencapai target iklim 2030–2050, termasuk isu subsidi perikanan, polusi plastik, dan subsidi bahan bakar fosil dalam kerangka kebijakan WTO yang non-diskriminatif.

Dialog juga menyoroti potensi *Blue Economy* di kawasan IORA, seperti perikanan berkelanjutan, ekowisata, dan bioteknologi kelautan, yang memerlukan tata kelola terpadu. Selain itu, ditekankan pentingnya pembangunan kapasitas, transparansi regulasi, peningkatan daya saing investasi, dan konektivitas sebagai dasar diversifikasi ekonomi. Pertemuan turut membahas penguatan lingkungan usaha dan proyek prioritas, termasuk optimalisasi MoU UKM, penyederhanaan prosedur lintas batas, serta usulan pembentukan *working group* standar dan sertifikasi UKM, pengembangan portal perizinan digital, dan pelatihan pemasaran digital.

7. Kegiatan Kerja Sama Organisasi PBB (UNCTAD, UNESCAP) dan Organisasi Internasional Lainnya

United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD

Trade and Development Board, 77th Executive Session (Jenewa-Online, 3-5 Februari 2025).

Pertemuan Sesi Eksekutif ke-77 TDB United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dilaksanakan tanggal 3-5 Februari 2025 di Jenewa-Swiss. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Tetap Misi

Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan OI lainnya di Jenewa/ KUALA LUMPUR, Duta Besar Achsanul Habib, beserta jajarannya (fisik), dan dihadiri oleh Dit. Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (online).

Pertemuan membahas beberapa agenda diantaranya: a) Interdependensi dan strategi pembangunan negara anggota, b) Penyampaian Laporan *Least Developed Countries* (LDCs) dengan fokus potensi pasar karbon, c) Penyampaian Laporan *Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2024*, dan d) Persiapan Konferensi Empat Tahunan UNCTAD 16 pada Oktober 2025.

- ***Interdependence and development strategies in a globalized world.*** Penyampaian *Trade and Development Report 2024* dengan fokus pada ketidakpuasan global terhadap kondisi ekonomi yang dialami oleh negara berkembang. Laporan juga membahas perubahan dalam perdagangan global, sektor jasa yang semakin dominan dan kondisi ketahanan pangan global.
- ***The Least Develop Countries Report 2024: Leveraging Carbon Markets for Development.*** Menyoroti potensi pasar karbon untuk LDCs mengatasi kesenjangan ekonomi dan mitigasi perubahan iklim. Meskipun beberapa LDCs telah terlibat perdagangan karbon, terdapat ketidakpastian finansial serta keterbatasan kapasitas teknologi dan infrastruktur. Indonesia menekankan pentingnya peran UNCTAD dalam membantu peningkatan kapasitas terkait pasar karbon, memperkuat kerja sama internasional untuk akses teknologi dan pembiayaan, serta menggarisbawahi bahwa pasar karbon bukan solusi utama, melainkan alat tambahan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- ***Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2024: Low-growth Trap, Climate Change and Employment Trends.*** Menyoroti tantangan besar yang dihadapi kawasan ini, termasuk pertumbuhan perdagangan yang rendah, ketergantungan pada ekspor komoditas, serta dampak perubahan iklim dan kesenjangan gender. Sebagai tindak lanjut, perlu diversifikasi produk, kebijakan perlindungan konsumen, peningkatan investasi untuk pertumbuhan inklusif.

Committee of Participants (COP) Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) (Jenewa, 25 September 2025)

Pertemuan dipimpin oleh Wakil Tetap Maroko selaku Presiden COP GSTP, Indonesia diwakili oleh PTRI Jenewa. Sejumlah hal yang mengemuka dalam pertemuan antara lain sebagai berikut:

- a. Negara-negara yang telah meratifikasi protokol SPR menyampaikan komitmen untuk melakukan konfirmasi atas tarif konsesi berdasarkan hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Sekretariat.
- b. Malaysia, Argentina, dan India menyampaikan pernyataan untuk terus mendorong negara-negara anggota lainnya agar segera

merealisasikan keberlakuan SPR serta memperkuat kerja sama lebih lanjut dalam kerangka GSTP.

- c. Sejumlah negara menekankan bahwa berbagai potensi kerja sama dalam GSTP perlu diterjemahkan ke dalam aksi konkret dan kajian berbasis data, sehingga negara-negara anggota dapat memiliki pandangan yang lebih komprehensif serta landasan strategis yang lebih kuat untuk melanjutkan kerja sama dalam kerangka GSTP.

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-16 UNCTAD (Jenewa, 20-23 Oktober 2025)

Merupakan forum tertinggi UNCTAD, diselenggarakan tiap 4 tahun untuk bahas upaya kolektif dalam mendorong sinergi antara perdagangan dan pembangunan global. Delegasi Kemendag dipimpin oleh Dirjen PPI dan hadir pada: Side Event ASEAN; Global System of Trade Preferences (GSTP) Ministerial Meeting; Global Commodities Forum - Harnessing Critical Energy Transition Minerals for Diversification and Global Supply Chain Resilience; Side Event Bappenas; Parallel Event - Trade Related Regulations.

- **Side Event ASEAN.** Dilaksanakan dengan tema “*Driving Economic Transformation: ASEAN’s Strength in Digital Innovation and Investment Resilience for Sustainable Development*”. Diskusi ini menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama regional dalam bentuk fasilitasi investasi dan peningkatan pengembangan ekonomi digital, seperti ASEAN *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) dan ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) dengan tetap memberikan *policy space* bagi ASEAN yang cukup dalam mengantisipasi dampak negatif dari proses integrasi tersebut.
- **GSTP Ministerial Meeting.** Pertemuan GSTP mengundang 42 negara anggota GSTP dan diakhiri dengan diadopsinya *Joint Communiqué (JC): Strengthening South-South trade cooperation under GSTP in times of global uncertainty*. Tidak ada negara yang keberatan terhadap JC. JC antara lain menekankan pentingnya perdagangan antarkawasan selatan – selatan melalui GSTP; rujukan terhadap Sao Paulo Round; potensi isu kerja sama antara lain terkait tarif, para tarif, non-tarif, *direct trade measures*.
- **Global Commodities Forum.** Pertemuan ini mengangkat tema “*Critical Energy Transition Minerals*” untuk membahas peluang dan tantangan dari meningkatnya permintaan mineral kritis di negara berkembang sekaligus upaya diversifikasi ekonomi, memperkuat rantai pasok global, dan mendukung transisi hijau yang adil dan berkelanjutan. *Global Commodities Forum* Panel 1 dibuka oleh Pedro Manuel Moreno-Deputi Sekjen UNCTAD. Para pembicara yaitu Julien Paluku Kahongya-Menteri Perdagangan Internasional Kongo, Djatmiko Bris Witjaksono-Dirjen PPI Kemendag, Julia

Imene-Chanduru-Duta Besar Namibia untuk PBB dan Francisca Tatchouop Belobe-Komisioner African Union Commission.

Sebagai salah satu panelis pada *Global Commodities Forum*, Dirjen PPI sampaikan:

- Indonesia sebagai negara berkembang memiliki hak untuk berkembang (*right to develop*);
- Untuk mengembangkan hilirisasi, Indonesia tidak akan menutup diri terhadap kerja sama dengan negara lain, khususnya dalam bidang teknologi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia;
- Melalui kolaborasi global, Indonesia akan mendorong transisi energi yang berkeadilan serta berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengembangan mineral kritis di dalam naik kelas dalam rantai nilai global (*global value chain*).



Gambar 21. Dirjen PPI sebagai narasumber dalam Global Commodities Forum UNCTAD16

- **Side Event Indonesia.** KemenPPN/Bappenas, bekerja sama dengan PTRI Jenewa juga selenggarakan *side event* terkait Makan Bergizi Gratis (MBG). Indonesia menyampaikan pentingnya penguatan *supply chain* pangan dengan menggali potensi dan kapasitas lokal untuk memenuhi ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia.

- *Parallel Event-Trade Related Regulations*. Secara garis besar membahas pentingnya *Non-Tariff Measures* (NTMs) bagi perdagangan global dan integrasi ekonomi regional sebagai bentuk responsif UNCTAD dari praktik unilateral yang menyebabkan ketidakpastian perdagangan global.

Pertemuan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Multi Year Expert Meeting on Commodities and Development, 9-10 Desember 2025

Pertemuan membahas kebijakan negara dalam mendorong pengolahan dan diversifikasi produk pertanian guna meningkatkan daya saing ekspor. Tantangan yang dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan ekspor produk pertanian bernilai tambah serta langkah kebijakan untuk mengatasinya.

Dalam konteks perdagangan, Indonesia menghadapi tantangan dari instabilitas pasar global dan fragmentasi logistik internal sebagai negara kepulauan. Indonesia berupaya mengatasinya dengan membangun infrastruktur transportasi yang masif (Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan dan Trans-Jawa) untuk mengurangi biaya logistik domestik. Selain itu, fokus pada keberlanjutan dan pembentukan klaster produksi regional menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri hilir. Indonesia juga aktif mempromosikan investasi dan menandatangani perjanjian perdagangan untuk membuka pasar, mengembangkan Zona Ekonomi Khusus untuk pengolahan pertanian dan meningkatkan efisiensi melalui system *National Single Window*.

Dubes RI Bapak Achsanul Habib menjadi Chairperson pada pertemuan ini yang membahas agenda diversifikasi strategis dari ketergantungan komoditas sebagai tantangan kritis dan identifikasi rekomendasi kebijakan untuk mendorong penambahan nilai. UNCTAD menyediakan platform yang tepat mengatasi volatilitas harga komoditas pertanian serta mengembangkan investasi.

Dalam kesempatan ini, DPAKOI telah menyiapkan bahan Dubes RI untuk WTO, Nur Rakhman Setyoko sebagai salah satu pembicara yang menyampaikan Indonesia sebagai negara berkembang dimana sektor perdagangannya masih bergantung pada komoditas. Diversifikasi dan penambahan nilai merupakan elemen krusial dalam menghadapi kerentanan ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas.

Pertemuan UNCTAD MYEM menegaskan kembali bahwa diversifikasi dan penambahan nilai dalam sektor komoditas sangat penting. Diperlukan pendekatan terkoordinasi dan multidimensional mencakup investasi infrastruktur, pengembangan kualifikasi SDM, transfer teknologi, dan

kebijakan perdagangan yang mendukung transformasi struktural serta mitigasi terhadap bencana alam serta konflik.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP

Pertemuan the Second Session of the Committee on Trade, Investment, Enterprise and Business Innovation (CTI EBI-2) UNESCAP diadakan tanggal 28-30 Mei 2025 di Bangkok, Thailand. Delri DPAKOI hadir secara daring pada pertemuan tersebut.

Pertemuan mengangkat 5 agenda diantaranya: a) Trends in Trade Cooperation for Sustainable Development in the Asia-Pacific Region, b) Private Sector Leadership in Scaling Up Sustainable Business Practices and Solutions In The Asia-Pacific Region, c) Mobilizing Foreign Direct Investment for Sustainable Development, d) Advancing Agenda on Business Innovation for Inclusive and Sustainable Development, e) Fostering Cooperation to Leverage Innovation and Technology for Sustainable Development.

Pertemuan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh ESCAP yaitu:

- Melanjutkan kerja sama kegiatan riset analisis dan pengembangan kapasitas bidang perdagangan, investasi, kewirausahaan, dan inovasi bisnis termasuk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- Meningkatkan kerja sama perdagangan melalui the Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific (CPTA).
- Melanjutkan engagement dengan dunia usaha melalui ESCAP Sustainable Business Network dan the Asia-Pacific Business Forum.

Paperless Trade Week UNESCAP

Pertemuan Paperless Trade Week UNESCAP diadakan tanggal 9 – 13 Juni 2025. di Bangkok, Thailand. Pada pertemuan ini Delegasi RI hadir luring. Tujuan pertemuan ini untuk meningkatkan kapasitas negara-negara anggota dalam digitalisasi perdagangan dan rantai pasok, mendukung negara-negara memajukan perdagangan digital, khususnya melalui implementasi *Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific* (CPTA). Rangkaian Pertemuan PTW terdiri dari *Capacity Building Events; 4th sessions of the Standing Committee of the Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless Trade for Asia and the Pacific* (CPTA) atau disingkat *4th SC-CPTA*; *4th sessions of the Paperless Trade Council of the CPTA* atau disingkat *4th PTC-CPTA*; *Consultation meeting project ESCAP – Islamic Development Bank (IsDB)*. Indonesia menjadi observer dalam pertemuan *4th SC-CPTA* dan *4th PTC-CPTA*.

- Capacity Building Events: UNESCAP menyelenggarakan capacity building berupa workshop yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kolaborasi sektor publik dan swasta dalam digitalisasi rantai pasok dan perdagangan digital melalui implementasi CPTA 2025 secara hybrid.
- 4th sessions of the Standing Committee of the Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless Trade for Asia and the Pacific (CPTA) atau disingkat 4th SC-CPTA; Pertemuan membahas antara lain proses implementasi anggota pada CPTA; Mutual recognition of trade related documents and data; Pertukaran dokumen perdagangan elektronik diantara anggota CPTA; Upaya digitalisasi dalam beberapa konvensi PBB.
- 4th sessions of the Paperless Trade Council of the CPTA atau disingkat 4th PTC-CPTA; Pertemuan menyepakati penambahan Uzbekistan sebagai negara anggota ke 14 CPTA; dan juga membahas evaluasi proses perjanjian dan perkembangan CPTA di kawasan Asia-Pasifik, peluang dan tantangan serta langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan CPTA. Untuk mendukung implementasi CPTA.
- Consultation meeting ESCAP – Islamic Development Bank (IsDB) Project “Advancing Trade Digitalization in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Asian Countries through Single Window Interoperability”. Pertemuan untuk mendapatkan pemahaman awal mengenai upaya digitalisasi, perkembangan, tantangan dan peluang dalam implementasi digitalisasi perdagangan melalui interoperabilitas Single Window serta kelancaran pertukaran data pada 5 (lima) negara yaitu: (a) Indonesia, (b) Bangladesh, (c) Maladewa, (d) Pakistan, dan (e) Uzbekistan. Delri menyampaikan interoperabilitas Single Window di Indonesia membutuhkan penerapan teknologi, harmonisasi kebijakan, pembangunan infrastruktur digital dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Penilaian yang komprehensif terhadap situasi di lapangan, penting untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada dan perlu ditingkatkan.

8. Kegiatan Kerja Sama Organisasi CPTPP

Pertemuan Awal dengan *Commission Chair* CPTPP 2024 dalam rangka Persiapan Akses Indonesia dalam CPTPP, Tanggal 30 Desember 2024

Terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam proses akses CPTPP yang dikenal dengan “*Auckland Principles*”, yaitu: calon negara anggota harus siap memenuhi standar tinggi CPTPP, calon negara anggota bersedia menunjukkan keinginan untuk memenuhi komitmen perjanjian, dan pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus oleh semua negara anggota CPTPP.

Indonesia diminta untuk melengkapi “*Questionnaire for Aspirant Economies*” untuk mengevaluasi kesiapan, mengukur kapasitas dan

kesiapan calon negara anggota dalam memenuhi seluruh standar tinggi CPTPP. Terkait hal ini, tim teknis Kanada akan membantu Indonesia dalam mengakses kuesioner dan *CPTPP Online System*.

Berdasarkan hasil diskusi awal Kanada dengan *Senior Officials* CPTPP, lebih dari 6 (enam) negara anggota mendukung rencana akses Indonesia ke dalam CPTPP. Terkait akses pasar, calon negara anggota akan menyampaikan *offer-list* dalam *plenary meeting* CPTPP. Apabila *offer-list* secara umum dapat diterima oleh negara anggota, proses selanjutnya adalah perundingan bilateral dengan setiap negara anggota CPTPP. Kesepakatan akses pasar dalam setiap perundingan bilateral kemudian akan digabungkan dengan *offer-list* yang telah disepakati dalam *plenary meeting* untuk membentuk *final offer-list*.

Pertemuan Bilateral di Pertemuan APEC MRT dengan Selandia Baru, tanggal 15 - 16 Mei 2025

Pada Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) 2025 di Jeju, Korea Selatan, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru Todd McClay untuk membahas penguatan kerja sama perdagangan, khususnya di sektor pertanian dan hortikultura, serta dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan WTO. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya dukungan Selandia Baru terhadap proses akses Indonesia ke CPTPP dan OECD, sekaligus mendorong perluasan akses pasar bagi produk UMKM Indonesia.

Kementerian Perdagangan, dengan dukungan Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, perlu terus berperan aktif dalam memanfaatkan forum dan pertemuan bilateral strategis guna memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika perdagangan global, serta memastikan kerja sama internasional memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan negara berkembang.



Gambar 1. Pertemuan Bilateral Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Selandia Baru Todd McClay di sela-sela rangkaian Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) 2025

Pertemuan ASEAN - CPTPP Trade and Investment Dialogue di sela-sela 9th CPTPP Commision Meeting di Melbourne, tanggal 20 November 2025

Pembahasan kerja sama perdagangan antara ASEAN dan CPTPP dilakukan melalui CPTPP–ASEAN Trade and Investment Dialogue sebagai forum untuk membahas isu-isu perdagangan dan investasi yang menjadi kepentingan bersama. Dialog ini diselenggarakan pada November 2025 dan menjadi langkah awal penguatan diskusi antara negara-negara ASEAN dan CPTPP guna mendorong keterbukaan, daya saing, ketahanan, serta keberlanjutan ekonomi kawasan.

Kementerian Perdagangan, sebagai institusi yang berperan aktif dalam perundingan dan dialog perdagangan internasional, perlu terus mendorong pembahasan yang konstruktif dalam forum ini, termasuk pada area fasilitasi perdagangan, penguatan UMKM, dan perdagangan berkelanjutan. Partisipasi aktif Indonesia, termasuk melalui penugasan *Senior Official* untuk menindaklanjuti dialog pada tahun 2026, diharapkan dapat mendukung kepentingan nasional, memperkuat kerja sama regional, serta memperoleh dukungan positif bagi proses akses Indonesia ke CPTPP dalam kerangka kerja sama multilateral dan plurilateral.



Gambar 23. Wakil Menteri Perdagangan menghadiri CPTPP–ASEAN Trade and Investment Dialogue yang digelar secara virtual di Kantor Kementerian Perdagangan



Gambar 24. Wakil Menteri Perdagangan menghadiri CPTPP–ASEAN Trade and Investment Dialogue yang digelar secara virtual di Kantor Kementerian Perdagangan

Sasaran Program 2

Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia

Indikator Kinerja Program 2:

Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Cara Perhitungan:

$$D_t = \frac{\sum D_{jt}}{\sum E_{jt}} \times 100$$

D_t = Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

D_{jt} = Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

E_{jt} = Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan.

Pada tahun 2025, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) telah berupaya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional. DPAKOI berhasil memperjuangkan 21 (dua puluh satu) dari 23 (dua puluh tiga) proposal yang mencerminkan kepentingan Indonesia menjadi bagian dari deklarasi/statement di forum APEC dan G20. Dengan demikian realisasi IK-2 adalah sebesar 91,3 persen dengan capaian sebesar 114,1 persen.

Perhitungan realisasi indikator menunjukkan nilai sebesar 91,3 persen, sehingga capaian IK-2 tercatat mencapai 114,1 persen. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2024.

Pada tahun 2024, DPAKOI berhasil memperjuangkan 20 (dua puluh) dari 21 (dua puluh satu) proposal yang mencerminkan kepentingan Indonesia untuk menjadi bagian dari deklarasi/statement di forum G20, dengan tingkat realisasi sebesar 95 persen.

Sementara itu, pada tahun 2025 DPAKOI berhasil memperjuangkan 21 (dua puluh satu) dari 23 (dua puluh tiga) proposal, dengan tingkat realisasi sebesar 91,3 persen. Penurunan persentase realisasi tersebut terjadi meskipun jumlah kepentingan yang diperjuangkan pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan tahun 2024.

Dengan demikian, penurunan capaian persentase ini tidak semata-mata mencerminkan penurunan kinerja, melainkan lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan kompleksitas proposal yang diperjuangkan, yang secara proporsional memengaruhi nilai realisasi meskipun capaian absolut menunjukkan peningkatan.

Proses negosiasi di tingkat internasional memerlukan waktu yang cukup panjang dan melibatkan berbagai tahapan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta pendekatan diplomatik yang intensif dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional terkait. Selain itu, dinamika geopolitik global dalam forum internasional juga mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap usulan yang diajukan Indonesia.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan IK-2 antara lain:

- Efektifnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam memastikan substansi dalam deklarasi dan statement sesuai dengan kepentingan nasional;
- Konsistensi dan dukungan Kementerian/Lembaga dalam mengawal isu yang merupakan kepentingan nasional;
- Kesamaan pandangan dalam menyuarakan dan mendorong inisiatif yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional.

DPAKOI terus memperjuangkan inisiatif/proposal yang mencerminkan kepentingan Indonesia untuk menjadi bagian dari deklarasi/statement. Pada tahun 2025, DPAKOI telah berhasil memperjuangkan posisi Indonesia pada APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement 2025 dan “Statement of the APEC Committee on Trade and Investment, together with the APEC Investment Experts’ Group Supporting the Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)”.

Terdapat 4 (empat) isu yang diperjuangkan Indonesia dalam APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement 2025 serta diakomodir yaitu (1) Isu Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS); (2) Isu Ekonomi Digital dan Kecerdasan Artifisial (AI); (3) Isu Ketahanan Rantai Pasok; (4) Isu Aspek Inklusivitas dalam Perdagangan.

Sementara itu terdapat isu yang tidak diakomodir dalam Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS). Pada “Statement of the APEC Committee on Trade and Investment, together with the APEC Investment Experts’ Group Supporting the Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)” terdapat lima hal yang dapat diakomodir yaitu terkait narasi dan referensi target dan tujuan serta arah fasilitasi investasi untuk pembangunan.

Secara lebih detil kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut terangkum dalam agenda berikut.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

INDIKATOR	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	80	95	118.75	80	91.3	114.1

Sumber: DPAKOI (2026)

Beberapa faktor yang berkontribusi pada pencapaian IK-2 diantaranya sebagai berikut:

- a. efektifnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam memastikan substansi dalam deklarasi dan statement sesuai dengan kepentingan nasional;
- b. konsistensi dan dukungan Kementerian/Lembaga dalam mengawal isu yang merupakan kepentingan nasional;
- c. kesamaan pandangan dalam menyuarakan dan mendorong inisiatif yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional;

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Telah melakukan upaya untuk dapat memberikan kontribusi diterimanya proposal ataupun deklarasi/statement kepentingan Indonesia yang diajukan untuk menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional. Secara lebih detil kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut antara lain:

Daftar Usulan Posisi Indonesia “APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement (Mei 2025)”

Dalam konteks **APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement (Mei 2025)**, Indonesia menyampaikan sejumlah usulan posisi yang diakomodir sebagai berikut:

1. Isu Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS)

Indonesia mengusulkan penyeimbangan narasi dukungan APEC terhadap MTS dengan memasukkan elemen reformasi WTO, termasuk dukungan terhadap penguatan fungsi penyelesaian sengketa. Isu ini pada akhirnya **diakomodir** dalam formulasi akhir pernyataan bersama, meskipun dengan bahasa yang lebih umum.

2. Isu Ekonomi Digital dan Kecerdasan Artifisial (AI)

Indonesia mengusulkan:

- Penurunan tingkat komitmen terhadap dukungan perpanjangan permanen moratorium WTO atas bea masuk transmisi elektronik, selaras dengan hasil MC13, serta mendorong pembahasan *Work Program on Electronic Commerce (WPEC)*.
- Penghapusan referensi terkait pembentukan *AI Standard Forum* karena tidak sejalan dengan posisi nasional.
- Penyesuaian tingkat komitmen terkait adopsi AI untuk fasilitasi perdagangan.
- Penambahan elemen untuk menjembatani kesenjangan dalam transformasi digital.

3. Isu Ketahanan Rantai Pasok

Indonesia menyesuaikan narasi terkait usulan pembentukan forum diskusi ketahanan rantai pasok agar selaras dengan hasil pembahasan *Forum on Sustainable Supply Chains*.

4. Isu Aspek Inklusivitas dalam Perdagangan

Indonesia mengusulkan penyesuaian narasi terkait terminologi “Indigenous People” agar sesuai dengan *agreed language* yang lazim digunakan dalam pernyataan bersama APEC.

Secara keseluruhan, pendekatan Indonesia dalam perundingan Joint Statement MTR Mei 2025 menunjukkan upaya konsisten untuk menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, kepentingan nasional dalam isu ekonomi digital dan AI, serta sensitivitas terhadap dinamika posisi masing-masing Ekonomi APEC.

Dalam pembahasan **APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement (Mei 2025)**, Indonesia mengusulkan penguatan narasi terkait isu plurilateral/Joint Statement Initiative (JSI) sebagaimana telah disepakati pada Pertemuan Pemimpin Asia-Pacific Economic Cooperation 2024. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan pencantuman elemen dukungan terhadap pengembalian mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bagian dari dukungan APEC terhadap reformasi World Trade Organization (WTO).

Usulan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan komitmen terhadap penguatan Sistem Perdagangan Multilateral (Multilateral Trading System/MTS) yang berbasis aturan serta mendukung reformasi WTO yang menyeluruh dan efektif.

Namun demikian, mengingat terdapat beberapa Ekonomi APEC yang belum dapat mendukung formulasi yang terlalu spesifik terkait dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, tuan rumah APEC 2025 mengusulkan agar pernyataan tersebut dirumuskan secara lebih umum sebagai bentuk dukungan terhadap WTO tanpa menyebutkan secara eksplisit isu JSI maupun pengembalian mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan ini kemudian disepakati secara konsensus oleh seluruh Ekonomi APEC.

Dengan demikian, usulan Indonesia terkait penguatan narasi JSI dan dukungan eksplisit terhadap pengembalian mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks reformasi WTO **tidak diakomodir** dalam naskah akhir pernyataan bersama pada isu Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS).

Dalam pembahasan “**Statement of the APEC Committee on Trade and Investment, together with the APEC Investment Experts’ Group Supporting the Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)**” (Mei 2025), Indonesia menyampaikan sejumlah usulan posisi yang pada akhirnya **diakomodir** dalam naskah akhir pernyataan.

Adapun usulan Indonesia meliputi:

1. **Penyesuaian narasi tujuan IFDA** agar lebih menekankan pada upaya mendorong anggota menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan investasi, sejalan dengan semangat fasilitasi dan penyederhanaan prosedur.
2. **Penghapusan referensi terkait tujuan “investasi berkualitas”**, dengan pertimbangan bahwa tujuan utama *Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)* di bawah World Trade Organization adalah untuk memfasilitasi dan menarik investasi, tanpa menetapkan kriteria atau standar kualitas investasi tertentu.
3. **Penyesuaian narasi referensi isu plurilateral** agar selaras dengan bahasa yang telah disepakati dalam *APEC AMM Joint Statement 2024*, guna menjaga konsistensi posisi dan kesinambungan komitmen antar dokumen APEC.
4. **Penghapusan referensi target tahun pencapaian konsensus** terkait upaya inkorporasi IFDA ke dalam kerangka hukum WTO, guna menghindari pengikatan komitmen waktu yang belum disepakati secara multilateral.
5. **Pengusulan arah fasilitasi asistensi teknis dan peningkatan kapasitas implementasi IFDA** dari Ekonomi Maju kepada Ekonomi Berkembang, yang diselaraskan dengan ketentuan (provisions) dalam IFDA, khususnya dalam mendukung kesiapan implementasi dan pemanfaatan perjanjian secara efektif.

Komite Perdagangan dan Investasi APEC bersama Kelompok Kerja Ahli Investasi APEC menyepakati pernyataan bersama terkait dukungan terhadap perjanjian WTO mengenai fasilitasi investasi, dan hasil tersebut kemudian dicatat dalam Pernyataan Bersama Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation.

Isu Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS)

Dalam pembahasan dokumen hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC Economic Leaders' Week (AELW) 2025, Indonesia secara konsisten mendukung agar Asia-Pacific Economic Cooperation mempertahankan komitmen kuat terhadap sistem perdagangan multilateral, baik dalam pernyataan tingkat Menteri maupun tingkat Pemimpin.

Sebagai bagian dari daftar usulan posisi Indonesia, disampaikan beberapa poin sebagai berikut:

1. **Penghapusan referensi dukungan dan komitmen APEC terhadap Permanent Extension of Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions(CDET).**
Usulan ini didasarkan pada posisi nasional yang tidak mendukung perpanjangan permanen moratorium tersebut.
2. **Penolakan terhadap dokumen CTI–DESG Joint Statement Supporting the Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions and the WTO JSI on Electronic Commerce,** karena tidak sejalan dengan posisi nasional Indonesia yang menolak Permanent Extension of Moratorium on CDET serta mempertimbangkan arah kebijakan Indonesia ke depan terkait partisipasi dalam JSI E-Commerce di World Trade Organization.

Dalam proses perundingan, tidak tercapai konsensus terhadap usulan dokumen CTI–DESG dimaksud, sehingga dokumen tersebut tidak diadopsi.

Namun demikian, pertemuan berhasil mencapai konsensus terhadap dua dokumen utama, yaitu:

1. **Joint Ministerial Statement 36th APEC Ministerial Meeting 2025,** yang disepakati oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan APEC; dan
2. **2025 APEC Leaders' Gyeongju Declaration,** yang disepakati oleh para Pemimpin Ekonomi APEC.

Meskipun Indonesia mendorong penguatan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral, dalam dinamika perundingan terdapat salah satu Ekonomi anggota yang memiliki posisi kuat untuk tidak memasukkan referensi eksplisit terkait sistem perdagangan multilateral. Oleh karena itu, formulasi komitmen dalam dokumen tingkat Pemimpin diarahkan pada kerja sama perdagangan global secara lebih umum.

Kendati demikian, referensi terkait WTO serta pengakuan atas diskusi yang tengah berlangsung tetap dapat dipertahankan dalam pernyataan bersama tingkat Menteri APEC.

Dengan demikian, pada isu Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS), posisi Indonesia secara substansi **terakomodir** dalam menjaga rujukan terhadap WTO pada tingkat Menteri, namun **tidak seluruhnya diakomodir** dalam formulasi tingkat Pemimpin yang menggunakan bahasa yang lebih umum terkait kerja sama perdagangan global.

Rekapitulasi Hasil Perundingan Posisi Indonesia pada APEC 2025

Secara keseluruhan, dalam berbagai dokumen pernyataan bersama Asia-Pacific Economic Cooperation 2025—baik pada tingkat Komite, Menteri, maupun Pemimpin—Indonesia menyampaikan sejumlah usulan substansi yang mencerminkan kepentingan nasional, khususnya terkait penguatan sistem perdagangan multilateral, isu ekonomi digital, IFDA, serta berbagai aspek teknis lainnya.

Dari keseluruhan usulan yang diajukan:

- 14 (empat belas) usulan diakomodir, baik secara penuh maupun dengan penyesuaian redaksional dalam naskah akhir.
- 2 (dua) usulan tidak diakomodir, yaitu:
 1. Penguatan narasi eksplisit terkait dukungan terhadap isu plurilateral/JSI serta pencantuman elemen dukungan pengembalian mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks reformasi World Trade Organization (WTO) pada isu Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS).
 2. Penguatan referensi eksplisit sistem perdagangan multilateral dalam dokumen tingkat Pemimpin, yang pada akhirnya diformulasikan secara lebih umum menjadi kerja sama perdagangan global karena dinamika konsensus antar Ekonomi APEC.

Dengan demikian, mayoritas posisi Indonesia berhasil tercermin dalam dokumen akhir, menunjukkan efektivitas strategi perundingan dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus mempertimbangkan prinsip konsensus yang menjadi dasar pengambilan keputusan di APEC.

Presidensi G20 Afrika Selatan 2025

Salah satu Working Group pada Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 adalah Trade and Investment Working Group (TIWG), yang berfokus pada pembahasan isu-isu strategis di bidang perdagangan dan investasi global, termasuk penguatan sistem perdagangan multilateral, fasilitasi investasi yang berkelanjutan, serta respons terhadap tantangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok dunia.

TIWG menjadi platform bagi negara-negara anggota G20 untuk menyelaraskan kebijakan, mendorong kerja sama konkret, dan merumuskan rekomendasi kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tangguh. Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung arsitektur perdagangan dan investasi global yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam dua pertemuan TIWG yang telah dilaksanakan dalam rangkaian Presidensi G20 Afrika Selatan 2025.

Pertemuan TIWG 1 diselenggarakan pada tanggal 18–19 Maret 2025 secara virtual, di mana Indonesia mendorong pentingnya penguatan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, serta perlunya reformasi WTO yang lebih adil dan inklusif. Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan urgensi kolaborasi antarnegara G20 untuk membangun rantai pasok global yang tangguh dan responsif terhadap disrupsi global, termasuk akibat krisis geopolitik dan perubahan iklim.

Pada Pertemuan TIWG 2 yang dilaksanakan pada tanggal 6–8 Mei 2025 di Cape Town, Afrika Selatan. Indonesia kembali menegaskan posisi strategisnya dalam mendorong investasi berkelanjutan, khususnya investasi yang berpihak pada UMKM, ekonomi hijau, dan transformasi digital. Indonesia juga menyuarakan pentingnya menjaga keterbukaan pasar internasional, sekaligus mempertahankan ruang kebijakan nasional bagi negara berkembang untuk mencapai target pembangunan ekonominya.

Pada Pertemuan TIWG 3 yang dilaksanakan pada tanggal 29-31 Juli 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan, Indonesia menekankan pentingnya seluruh negara untuk tidak menggunakan proteksionisme dalam perdagangan global. Melalui kehadiran aktif pada ketiga pertemuan tersebut, Indonesia terus berupaya memperkuat kerja sama internasional dan memastikan bahwa kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia, tercermin dalam agenda perdagangan dan investasi global di bawah Presidensi G20 tahun ini.

Terdapat 5 (lima) isu prioritas yang diangkat pada pertemuan G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) Afrika Selatan yaitu: (1) Trade and Inclusive Growth; (2) Responsive Trade and Investment Agenda to Address the Challenge of Global Commons; (3) WTO Reform; dan (4) G20 Framework on Green Industrialisation and Investment.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) telah menghadiri pertemuan TIWG 3 pada tanggal 10 - 12 Juli 2023 di Kevadia serta pertemuan TIWG 4 dan TIMM pada tanggal 21 – 25 Agustus 2023 di Jaipur, India. Pertemuan TIWG 3 membahas 5 (lima) usulan outcome documents India,

sementara Pertemuan TIWG 4 fokus pada sesi drafting teks Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) Statement 2023.

Indonesia sebagai Troika menyampaikan keselarasan agenda prioritas yang diangkat oleh Presidensi G20 India dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Indonesia mengharapkan Keketuaan Indonesia di ASEAN serta Presidensi G20 India menjadi momentum penting kedua forum untuk saling bersinergi dan berkolaborasi mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta menghasilkan capaian-capaian konkret untuk kepentingan negara berkembang.

Sementara itu Pertemuan TIMM G20 diselenggarakan pada tanggal 24—25 Agustus 2023 di Jaipur India. Pada pertemuan tersebut Indonesia mengajak anggota G20 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengatasi kesenjangan. Indonesia juga menekankan agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terutama untuk mengembalikan fungsi Sistem Penyelesaian Sengketa WTO. Selain itu, Indonesia mendorong hasil konkret Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 WTO pada 2024 mendatang.

Indonesia menekankan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama atas pembangunan dan pengolahan sumber daya untuk hasilkan nilai tambah.

Trade and Investment Working Group (TIWG) – G20 Afrika Selatan 2025

Salah satu Working Group dalam Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 adalah **Trade and Investment Working Group (TIWG)**, yang berfokus pada pembahasan isu-isu strategis di bidang perdagangan dan investasi global. Fokus utama mencakup penguatan sistem perdagangan multilateral, fasilitasi investasi berkelanjutan, serta respons terhadap tantangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok global.

TIWG menjadi platform penting bagi negara-negara anggota G20 untuk menyelaraskan kebijakan, mendorong kerja sama konkret, dan merumuskan rekomendasi kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung arsitektur perdagangan dan investasi global yang inklusif, Indonesia berpartisipasi aktif dalam tiga pertemuan TIWG yang diselenggarakan dalam rangkaian Presidensi G20 Afrika Selatan 2025.

Secara keseluruhan, terdapat **7 (tujuh) statement atau posisi strategis Indonesia yang diakomodir** dalam dokumen hasil pembahasan TIWG, yaitu:

1. **Penguatan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan.**
2. **Dukungan terhadap reformasi World Trade Organization (WTO) yang lebih adil dan inklusif.**
3. **Peningkatan kolaborasi G20 dalam membangun rantai pasok global yang tangguh dan responsif terhadap disrupsi geopolitik dan perubahan iklim.**
4. **Dorongan terhadap investasi berkelanjutan yang berpihak pada UMKM.**
5. **Penguatan investasi untuk mendukung ekonomi hijau dan transformasi digital.**
6. **Pentingnya menjaga keterbukaan pasar internasional dengan tetap mempertahankan ruang kebijakan nasional bagi negara berkembang.**
7. **Penegasan agar negara-negara tidak menggunakan pendekatan proteksionisme dalam perdagangan global.**

Ketujuh poin tersebut tercermin dalam hasil pembahasan TIWG dan menunjukkan bahwa posisi Indonesia selaras dengan semangat kerja sama G20 dalam memperkuat sistem perdagangan dan investasi global yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.

Sasaran Program 3
Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional

Indikator Kinerja Program 3:

Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

INDIKATOR	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	85	89,75	106,6	85	86,7	102

Sumber: DPAKOI (2025)

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah melaksanakan kinerja III dengan meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum antar kawasan dan organisasi internasional dengan melakukan Konsultasi Publik sebagai kegiatan untuk memperluas informasi sehingga tersampainya pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan-kebijakan perundingan antar kawasan dan organisasi internasional dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Keberhasilan tercapainya realisasi pada indikator kinerja 3 yang telah dilaksanakan Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Focus Group Discussion (FGD) G20

Jaring Masukan Outcome TIWG Presidensi Afrika Selatan 2025 dan Proyeksi Agenda Prioritas TIWG Presidensi Amerika Serikat 2026

Kegiatan Jaring Masukan *Outcome* TIWG Presidensi Afrika Selatan 2025 dan Proyeksi Agenda Prioritas TIWG Presidensi Amerika Serikat 2026 telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 di FTA Center Bandung dengan partisipasi peserta secara luring dan daring. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sherpa G20 Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, FTA Center, serta unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi dinamika *outcome* TIWG pada Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 serta mengidentifikasi proyeksi agenda TIWG pada Presidensi Amerika Serikat 2026 dalam rangka merumuskan posisi dan kepentingan strategis Indonesia.

Dalam pembahasan disampaikan bahwa *outcome* TIWG Afrika Selatan cenderung bersifat umum dan kompromistis akibat perbedaan pandangan antaranggota, termasuk menguatnya kritik terhadap sistem perdagangan multilateral.

Sementara itu, Presidensi G20 Amerika Serikat tahun 2026 pada Trade Working Group (TWG) akan memfokuskan pada empat isu, yaitu *reducing chronic overcapacity, ending forced labor, denouncing weaponization of food, dan updating prinsip Most-Favored Nation (MFN)*. Terkait *overcapacity*, khususnya pada industri baja, disampaikan bahwa kapasitas produksi nasional masih dalam tahap penguatan dan belum terdapat definisi internasional yang disepakati. Pada isu *forced labor*, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang sejalan dengan standar *International Labor Organization (ILO)*. Terkait pangan, kebijakan pembatasan ekspor Indonesia ditegaskan sebagai instrumen perlindungan terhadap ketahanan pangan nasional, bukan sebagai bentuk *weaponization of trade*. Sementara itu, prinsip MFN dan penguatan sistem perdagangan multilateral tetap perlu diperjuangkan dalam konteks reformasi WTO menjelang KTM ke-16.

Kegiatan ini menghasilkan pemetaan awal posisi Indonesia serta kesepahaman lintas K/L untuk memperkuat koordinasi dan menyusun posisi nasional yang terstruktur guna mengoptimalkan forum G20 dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia terutama dalam bidang perdagangan.



Gambar 25. Jaring Masukan *Outcome* G20 TIWG Tahun 2025 dan Proyeksi Agenda G20 TIWG Tahun 2026, Bandung, 22 Desember 2025.

KINERJA ANGGARAN

Tabel 11. Realisasi Kinerja Anggaran DPAKOI 2025

Kode	Nama RO	Pagu	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
PBB.01	Rekomendasi Akses dalam OECD	25.746.000	25.746.000	0	100 %
PEC.001	Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC	120.398.000	120.398.000	0	100 %
PEC.004	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Kopi Internasional	14.518.000	14.515.953	2.047	99,99 %
PEC.005	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Karet Internasional	15.275.000	15.271.052	3.948	99,97 %
PEC.006	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Lada Internasional	14.750.000	14.749.500	500	100 %
PEC.007	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Kelapa Internasional	14.583.000	14.580.000	3.000	99,98 %
PEC.009	Kerja Sama Perdagangan dengan Negara Anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan Developing 8 (D-8)	171.133.000	171.005.686	127.314	99,93 %

Kode	Nama RO	Pagu	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
PEC.010	Kerja Sama Perdagangan Organisasi Internasional Lainnya	1.348.342.000	1.348.330.523	11.477	100 %
PEC.012	Kerjasama Perdagangan dengan Negara Anggota G20 dan Organisasi PBB	27.710.000	27.709.910	90	100 %
PEC.013	Kerjasama Perdagangan Organisasi Komoditas Internasional Lainnya	29.637.000	29.631.394	5.606	99,98 %
PEC.014	Kerja Sama Perdagangan di Forum Ekonomi Lainnya	13.578.000	13.576.833	1.167	99,99%

Sumber: DPAKOI (2025)

Pagu awal tahun sebesar Rp. 4.671.397.000,-. Setelah penyesuaian/ penghematan menjadi sebesar Rp 1.993.193.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.992.911.965,- atau 99,99%. Pos anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 281.035,- atau 0,01%. Penyebab masih adanya sisa anggaran karena terdapat selisih administrasi antara penggunaan anggaran dan pelaksanaannya.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

1. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional merupakan unit Eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perundingan dan kerja sama perdagangan pada forum antar kawasan dan organisasi internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
2. Secara umum, kinerja organisasi DPAKOI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam perundingan dan kerja sama perdagangan pada forum antar kawasan dan organisasi internasional telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Terkait kinerja anggaran, realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.992.911.965,- (satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus sebelas ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau 99,99% dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.993.193.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta serratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

REKOMENDASI

1. Memperhatikan adanya efisiensi dan *refocussing* anggaran pada tahun 2024, diperlukan perencanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya secara cermat dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia agar target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
2. Diperlukan pemantauan terhadap kinerja organisasi dan anggaran secara periodik guna memastikan kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan.
3. Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja organisasi serta sebagai bahan masukan untuk pengembangan program dan kegiatan di tahun mendatang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja DPAKOI khususnya dalam mengawal setiap kepentingan Indonesia pada perundingan dan kerja sama perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional.
4. Secara keseluruhan tahun anggaran, penyerapan anggaran ini telah memenuhi harapan secara umum dengan tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja

LAMPIRAN

Lampiran 1

**FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI
INTERNASIONAL
TAHUN 2020-2024**

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional	1 Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional (Kegiatan)	$KS_t = \sum KS_{jt}$ <p>KS_t= Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan KS_{jt}= Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional
2	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	1 Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	$D_t = \frac{\sum D_{jt}}{\sum E_{jt}} \times 100$ <p>D_t = Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan D_{jt} = Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan</p>	Informasi dan dokumen posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>internasional di tahun berjalan</p> <p>E_{jt}= Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan</p>	
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum APEC dan Organisasi Internasional	1 Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	$P_t = \frac{\sum P_{jt}}{\sum Q_{jt}} \times 100$ <p>P_t = Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tahun berjalan</p> <p>P_{jt} = Jumlah peserta kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah yang meningkat pemahamannya di tahun berjalan</p> <p>Q_{jt} = Jumlah total kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen kuesioner pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

Lampiran 2. PERKIN DPAKOI 2025

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN DI FORUM ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang di negara mitra antar kawasan dan organisasi internasional	Jumlah kegiatan kerja sama dalam rangka peningkatan akses pasar barang di forum antar kawasan dan organisasi internasional	Kerja sama	6
2	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persentase	80
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum antar kawasan dan organisasi internasional	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	Persentase	85